

POLITEKNIK NEGERI MADURA



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

www.poltera.ac.id

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I

Periode 30 Juni 2026

Politeknik Negeri Madura



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI MADURA

Jalan Raya Camplong KM 4, Taddan, Camplong, Sampang 69281
Madura, Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Politeknik Negeri Madura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Negeri Madura. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sampang, 23 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Negeri Madura

Laily Ulfiyah., M.T.
NIP.198608062014042002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	xii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	xiii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xiii
II. NERACA.....	xiii
III. LAPORAN OPERASIONAL	xiv
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xiv
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA.....	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	3
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
A. PENJELASAN UMUM	5
A.1. DASAR HUKUM.....	5
A.2. Kebijakan Teknis Politeknik Negeri Madura.....	9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.4. Basis Akuntansi.....	17

A.5.	Dasar Pengukuran	18
A.6.	Kebijakan Akuntansi	18
B.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	29
B.1.	Pendapatan.....	30
B.2.	Belanja.....	35
B.3.	Belanja Pegawai.....	37
B.4.	Belanja Barang	40
B.5.	Belanja Modal Tanah.....	44
B.6.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45
C.	PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	49
C.1.	Aset lancar	49
C.2.	Aset Tetap.....	53
C.2.1	Tanah.....	54
C.2.1	Peralatan dan Mesin	55
C.2.3	Gedung dan Bangunan	57
C.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	58
C.2.5	Aset Tetap Lainnya.....	59
C.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	60
C.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	63
C.3	Aset Lainnya.....	63
C. 3.1	Aset Tak Berwujud.....	64
C .3.2	Aset Lain-lain.....	65
C 3.3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	65

C. 4 Kewajiban.....	66
C. 4.1 Kewajiban Jangka Pendek.....	66
C.4.1.1 Utang kepada Pihak Ketiga	66
C.4.1.2 Pendapatan Yang Diterima Dimuka	67
C.4.1.4 Uang Muka dari KPPN.....	68
C.5 Ekuitas.....	68
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	69
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	69
D.2. Beban Pegawai.....	72
D.3. Beban Persediaan	74
D.4. Beban Barang dan Jasa	74
D.5. Beban Pemeliharaan.....	75
D.6. Beban Perjalanan Dinas	76
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	76
D.8. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	77
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	79
E.1. Ekuitas Awal	79
E.2. Surplus (Defisit) LO.....	80
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	80
E.4. Transaksi Antar Entitas	80
E.5. Ekuitas Akhir	81
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	81

F.1.	Alokasi DIPA dan Revisi DIPA.....	81
F.2.	Rekening Pemerintah	84
F.3.	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.....	85
F.4.	Penetapan Basis Akuntansi Akrual.....	85
F.5.	Pengungkapan Lainnya	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Untuk Periode Yang Berakhir s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	1
Tabel 2 Neraca Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	2
Tabel 3 Laporan Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	3
Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	4
Tabel 5. Susunan Organisasi Politeknik Negeri Madura	14
Tabel 6. Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih	22
Tabel 7 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	24
Tabel 8 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	26
Tabel 9. Kriteria Kualitas Piutang	28
Tabel 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	29
Tabel 11. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2026	30
Tabel 12. Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	31
Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2026.....	35
Tabel 14. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	36
Tabel 15. Perbandingan Rincian Belanja Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	38
Tabel 16 Daftar Pegawai Juli 2026	39
Tabel 17. Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	40
Tabel 18. Realisasi Belanja Barang Operasional Tahun 2026	41
Tabel 19. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun 2026.....	42
Tabel 20. Realisasi Belanja Barang Persediaan Konsumsi Tahun 2026	42
Tabel 21. Realisasi Belanja Jasa Tahun 2026.....	43
Tabel 22. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2026.....	43
Tabel 23. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2026	44
Tabel 24. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2026	44

Tabel 25 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	45
Tabel 26. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026	45
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46
Tabel 28 Rincian Aset Lancar	49
Tabel 29 Rincian Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	53
Tabel 30 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	53
Tabel 31 Rincian Tanah	55
Tabel 32 Rincian Tanah per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	55
Tabel 33. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2026	56
Tabel 34. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2026.....	57
Tabel 35. Rincian Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	58
Tabel 36. Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2026	58
Tabel 37. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	59
Tabel 38. Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2026.....	59
Tabel 39. Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	60
Tabel 40. Mutasi Nilai KDP Tahun 2026.....	60
Tabel 41. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	62
Tabel 42. Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2026	63
Tabel 43 Rincian Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	63
Tabel 44. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026.....	64
Tabel 45 Rincian Aset Tak berwujud.....	65
Tabel 46 Nilai Aset Lain-lain per 30 Juni 2026	65
Tabel 47 Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset Lainnya.....	66
Tabel 48. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026	66
Tabel 49. Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	67
Tabel 50. Rincian Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	69

Tabel 51. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	70
Tabel 52. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	73
Tabel 53. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	74
Tabel 54. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2024	75
Tabel 55. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	75
Tabel 56. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	76
Tabel 57. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	76
Tabel 58 Pendapatan dari kegiatan Non Operasional.....	79
Tabel 59 Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	79
Tabel 60. Rincian Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	81
Tabel 61. Daftar Rekening Pemerintah Tahun 2026.....	84
Tabel 62 7731 BEI Penyedia Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.....	90
Tabel 63 7732 BEI Peningkatan dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	92
Tabel 64 7732 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi.....	94



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026	36
---	----





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik Negeri Madura.....	14
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Berita Acara Rekonsiliasi SAKTI dengan SPAN
- B. Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. LRA Menurut MONSAKTI
 - a) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan s.d 30 Juni 2026
 - b) Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d 30 Juni 2026
 - 2. Dokumen DIPA Revisi Ke-9 TA. 2026 (Revisi Terakhir)
- C. Neraca
 - 1. Neraca Per 30 Juni 2026
 - 2. Neraca Percobaan Akrual Per 30 Juni 2026
 - 3. Neraca Percobaan Kas Per 30 Juni 2026
- D. Laporan Operasional
 - 1. Laporan Operasional s.d. 30 Juni 2026
- E. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 1. Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Percobaan Akrual Per 30 Juni 2026
- F. Lampiran-lampiran sebagai pendukung CaLK
 - 1. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - a. Rekonsiliasi Rekening, Kas Tunai dan Saldo Neraca
 - b. LPJ Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2026
 - 2. Kas di Bendahara Penerimaan
 - a. LPJ Bendahara Penerimaan 30 Juni 2026
 - b. Copy Rekening Koran BPN 036 POLTERA per 30 Juni 2026
 - 3. Kas Lainnya dan Setara Kas
 - 1. Copy Rekening Koran RPL 036 PS POLTERA per 30 Juni 2026
 - 4. Persediaan
 - a. Berita Acara Stock Opname Persediaan
 - 5. SIMAK-BMN
 - a. Lampiran A1 Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan
 - b. Neraca Sakti Modul Aset Tetap per Neraca Percobaan Akrual Per 30 Juni 2026
 - 6. Memo Penyesuaian
 - 7. Kertas Kerja Reviu

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan UAKPA 139.03.0500.693499 Politeknik Negeri Madura Tahun Anggaran 2026 terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode Neraca Percobaan Akrua Per 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sampang, 23 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Negeri Madura

Laily Ulfiyah., M.T.
NIP. 198608062014042002

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan UAKPA 139.03.0500.693499 Per Neraca Percobaan Akrual Per 30 Juni 2026 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan ini merupakan penyajian dari manajemen Politeknik Negeri Madura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan ini yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan perundang-undangan tentang keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Sampang, 23 Juli 2026

Ketua Satuan Pengawas Internal
Politeknik Negeri Madura

Dimas Panji Eka JP, S.Kom., M.Kom.
NIP.199112102025061003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan UAKPA 139.03.0500.693499 Politeknik Negeri Madura Tahun Anggaran 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Semester I meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp5.209.088.140** atau mencapai 81 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp6.470.700.000**.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2026 adalah berupa Belanja pegawai sebesar **Rp9.373.661.466**, Belanja Barang **Rp4.115.573.425** dan Belanja Modal **Rp26.945.886.976** sehingga total Realisasi Belanja sebesar **Rp40.435.121.867** atau **37** persen dari Realisasi Anggaran belanja **Rp108.938.198.000**.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan adalah sebesar **Rp.228.713.105.049** yang terdiri dari:

Aset Lancar

Rp

714.784.012

Aset Tetap Rp **227.825.843.437**

Aset Lainnya Rp **172.477.600**

Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2026 adalah sebesar **Rp1.543.700.850** meliputi Kewajiban Jangka Pendek antara lain:

Utang kepada Pihak Ketiga Rp **552.820.850**

Pendapatan Diterima Dimuka Rp **889.880.000**

Uang Muka dari KPPN Rp **101.000.000**

Sementara itu jumlah Ekuitas per 30 Juni 2026 adalah sebesar

Rp228.713.1-5.049

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar **Rp5.564.650.267** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp18.420.775.878** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp(12.856.125.611)**, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp(232.942.322)** dan **Rp(13.089.067.933)** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(13.089.067.933)**.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas Awal Politeknik Negeri Madura tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar **Rp205.032.330.905** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp(13.089.067.933)** dan koreksi-koreksi senilai **Rp107.500** ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp35.226.033.727** terdapat Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar **Rp22.137.073.294** sehingga

Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai **Rp227.169.404.199.**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK NEGERI MADURA LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I

Untuk periode yang berakhir s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Untuk Periode Yang Berakhir s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	2026			2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	4	6	7	8	10
A. Pendapatan Negara Dan						
I. Pendapatan Penerimaan	6.470.700.000	5.209.088.140	81	6.432.410.000	3.895.233.082	61
I. Pendapatan Penerimaan	6.470.700.000	5.209.088.140	81	6.432.410.000	3.895.233.082	61
Jumlah Pendapatan Negara	6.470.700.000	5.209.088.140	81	6.432.410.000	3.895.233.082	61
B. Belanja Negara	-	-	0	-	-	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	108.938.198.000	40.435.121.867	37	116.041.450.000	8.918.229.544	8
1. Belanja Pegawai	16.618.630.000	9.373.661.466	56	12.920.216.000	5.477.050.781	42
2. Belanja Barang	12.396.661.000	4.115.573.425	33	12.637.374.000	2.966.675.703	23
3. Belanja Modal	79.922.907.000	26.945.886.976	34	90.483.860.000	474.503.060	1
Jumlah Belanja Negara (B.I +	108.938.198.000	40.435.121.867	37	116.041.450.000	8.918.229.544	8

II. NERACA
**POLITEKNIK NEGERI MADURA
NERACA SEMESTER I**
PER 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
Tabel 2 Neraca Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	101.000.000,	0	101.000.000	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,	2.250.000	(2.250.000)	(100,00)
Piutang Bukan Pajak	2.250.000,	23.750.000	(21.500.000)	(90,53)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(11.250,)	(118.750)	107.500	(90,53)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2.238.750,	23.631.250	(21.392.500)	(90,53)
Persediaan	611.545.262,	953.710.410	(342.165.148)	(35,88)
JUMLAH ASET LANCAR	714.784.012,	979.591.660	(264.807.648)	(27,03)
ASET TETAP				
Tanah	59.185.191.947,	59.185.191.947	0	0,00
Peralatan dan Mesin	83.258.218.090,	83.384.970.630	(126.752.540)	(0,15)
Gedung dan Bangunan	122.920.559.616,	122.920.559.616	0	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	531.123.164,	531.123.164	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	1.726.243.533,	1.726.243.533	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.727.334.713,	13.015.974.997	26.711.359.716	205,22
AKUMULASI PENYUSUTAN	(79.522.827.626,)	(75.605.967.975)	(3.916.859.651)	5,18
JUMLAH ASET TETAP	227.825.843.437,	205.158.095.912	22.667.747.525	11,05
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	199.282.000,	199.282.000	0	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0,	8.068.238.197	(8.068.238.197)	(100,00)
Aset Lain-lain	235.052.070,	235.052.070	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET	(261.856.470,)	(255.061.070)	(6.795.400)	2,66
JUMLAH ASET LAINNYA	172.477.600,	8.247.511.197	(8.075.033.597)	(97,91)
JUMLAH ASET	228.713.105.049,	214.385.198.769	14.327.906.280	6,68
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	552.820.850,	8.068.238.197	(7.515.417.347)	(93,15)
Pendapatan Diterima Dimuka	889.880.000,	1.284.629.667	(394.749.667)	(30,73)
Uang Muka dari KPPN	101.000.000,	0	101.000.000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.543.700.850,	9.352.867.864	(7.809.167.014)	(83,49)
JUMLAH KEWAJIBAN	1.543.700.850,	9.352.867.864	(7.809.167.014)	(83,49)
EKUITAS				
Ekuitas	227.169.404.199,	205.032.330.905	22.137.073.294	10,80
JUMLAH EKUITAS	227.169.404.199,	205.032.330.905	22.137.073.294	10,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	228.713.105.049	214.385.198.769	14.327.906.280	6,68

III. LAPORAN OPERASIONAL

POLITEKNIK NEGERI MADURA LAPORAN OPERASIONAL SEMESTER I

Untuk periode yang berakhir s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Tabel 3 Laporan Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5.564.650.267,	3.214.743.667,	2.349.906.600,	73,098
Jumlah Pendapatan	5.564.650.267,	3.214.743.667,	2.349.906.600,	73,098
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	9.914.089.316,	5.944.225.748,	3.969.863.568,	66,785
Beban Persediaan	939.355.370,	0,	939.355.370,	
Beban Barang dan Jasa	2.857.661.120,	2.827.195.502,	30.465.618,	1,078
Beban Pemeliharaan	285.964.986,	109.983.434,	175.981.552,	160,007
Beban Perjalanan Dinas	387.150.097,	181.056.355,	206.093.742,	113,829
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.036.554.989,	0,	4.036.554.989,	
JUMLAH BEBAN	18.420.775.878,	9.062.461.039,	9.358.314.839,	103,265
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12.856.125.611,)	(5.847.717.372,)	(7.008.408.239,)	119,849
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(248.379.862,)	0,	(248.379.862,)	
Pendapatan Pelepasan Aset				
Beban Pelepasan Aset	248.379.862,	0,	248.379.862,	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non	15.437.540,	5.754.082,	9.683.458,	168,288
Pendapatan dari Kegiatan Non Op	15.437.540,	5.754.082,	9.683.458,	168,288
Beban dari Kegiatan Non Operasi	0,	0,	0,	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KE	(232.942.322,)	5.754.082,	(238.696.404,)	(4.148,297)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LU	(13.089.067.933,)	(5.841.963.290,)	(7.247.104.643,)	124,053
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0,	0,	0,	
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(13.089.067.933,)	(5.841.963.290,)	(7.247.104.643,)	124,053

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK NEGERI MADURA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEMESTER I

Untuk periode yang berakhir s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	205.032.330.905,	0,	205.032.330.905,	0,
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.089.067.933,)	(5.841.963.290,)	(7.247.104.643,)	124,05
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	107.500,	0,	107.500,	0,
LAIN-LAIN	107.500,	0,	107.500,	0,
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	35.226.033.727,	3.827.592.716,	31.398.441.011,	820,32
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	22.137.073.294,	(2.014.370.574,)	24.151.443.868,	(1.198,96)
EKUITAS AKHIR	227.169.404.199,	(2.014.370.574,)	229.183.774.773,	(11.377,44)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan Tahunan UAKPA 139.03.0500.693499 Tahun Anggaran 2026 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan akun-akun Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.1. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan barang Milik Negara;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- 22) Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- 26) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 27) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
- 28) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas;
- 29) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 30) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kemdiknas;
- 31) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 32) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;

- 33) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 34) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/M/214 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemendikbud;
- 35) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 36) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 Tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
- 37) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- 38) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
- 39) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara.
- 40) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
- 41) Surat Menteri Keuangan atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor S381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 Perihal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Perubahan;
- 42) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-210/PB/2024 perihal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2024 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara.
- 43) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-221/PB/2024 perihal Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai; dan KDP/ATB dalam Pengerjaan yang Dihentikan;

- 44) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dan Aset Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga.
- 45) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.
- 46) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- 47) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor 1092/DST/A2/KU.03.02/2026 tanggal 21 Juli 2026 perihal Langkah-langkah Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I Tahun 2026 di Lingkungan Kemdiktisaintek;

A.2. Kebijakan Teknis Politeknik Negeri Madura

Poltera merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang berkedudukan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Poltera didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura pada tanggal 29 Oktober 2012 dan diresmikan pada tanggal 11 November 2012.

Pendirian Politeknik Madura awalnya diprakarsai oleh Yayasan Bina Sampang Mandiri (BSM), yang diketuai oleh Ir. Mohammad Syaifurrahman Noer atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cipung, beliau adalah putra dari H. Mohammad Noer (alm) mantan Gubernur Jawa Timur. Hal ini disambut antusias oleh Bupati Sampang (Nurchaya, S.E.) saat itu. Selanjutnya, Yayasan BSM bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sampang merealisasikan gagasan tersebut, dan sepakat memberi Nama Politeknik Madura (POLTERA).

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, DEA., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan respon yang sangat luar biasa atas permohonan pendirian Politeknik Madura. Pada saat kunjungan ke lokasi kampus Politeknik Madura pada 12 Mei 2012, beliau

menyampaikan bahwa politeknik ini langsung akan menjadi Politeknik Negeri Madura (POLTERA). Ini merupakan bukti keseriusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam mengembangkan Politeknik di Madura.

Lambang Politeknik Negeri Madura bermakna dengan membawa jiwa Pancasila dan akhlak mulia, POLTERA

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas (Cerdas, Unggul Bermartabat) untuk sektor industri dimana lulusannya dipersiapkan untuk menjadi pelaku dalam pembangunan.

Politeknik Negeri Madura menyelenggarakan program studi D3 (Diploma-3) pada 3 (tiga) program studi (prodi) yaitu Prodi Teknik Listrik Industri, Prodi Teknik Mesin Alat Berat, dan Prodi Teknik Bangunan Kapal. Dan pada tahun 2018, terdapat penambahan 1 (satu) program studi baru berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 644/KPT/1/2019 yaitu Prodi D-3 bidang Keperawatan yang berasal dari penggabungan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur ke dalam POLTERA. Sehingga pada tahun 2018 Politeknik Negeri Madura menyelenggarakan 4 (empat) program studi.

Politeknik Negeri Madura didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya, sebagai bentuk pemerataan pendidikan sesuai dengan Permen Dikbud RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura yang dalam perkembangannya diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Adapun tugas pokok Politeknik Negeri Madura antara lain sebagai berikut:

1. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan khusus. penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pendidikan vokasi menekankan penerapan keahlian tertentu dan

- pembentukan kompetensi untuk menangani pekerjaan menurut praktek-praktek yang diakui dengan baik dalam bidang tertentu;
3. Penelitian merupakan kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian;
 4. Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Sedangkan fungsi Politeknik Negeri Madura sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 antara lain:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Visi Politeknik Negeri Madura yang tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 adalah :

“Menjadi politeknik yang unggul di bidang teknologi kemaritiman dan berdaya saing internasional”.

Untuk pelaksanaan Visi tersebut diperlukan misi sebagai bentuk nyata pelaksanaannya. Misi Politeknik Negeri Madura ditetapkan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Vokasi di bidang teknologi kemaritiman yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing internasional;
- b. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan

tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik;

- e. membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan; dan
- f. mengembangkan sistem informasi yang menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola Poltera.

Dalam rangka mencapai misi diperlukan jabaran pencapaiannya melalui tujuan Politeknik Negeri Madura antara lain:

- a. menghasilkan sistem Pendidikan Vokasi di bidang teknologi kemaritiman yang bertaraf internasional;
- b. menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik;
- c. menghasilkan lulusan yang berketuhanan, beretika, memiliki kompetensi unggul dan berdaya saing internasional;
- d. menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
- e. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Madura maka dirumuskan dalam Rencana Strategis POLTERA 2020-2024 dengan menyusun perencanaan pengembangan dalam beberapa aspek yakni:

- a. Leadership yang bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan leadership, manajerial, keorganisasian dan tata kerja POLTERA;
- b. Relevansi dan kualitas akademik melalui pengembangan kualitas lulusan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan kualitas sarana – prasarana dan bahan ajar, pengembangan kurikulum

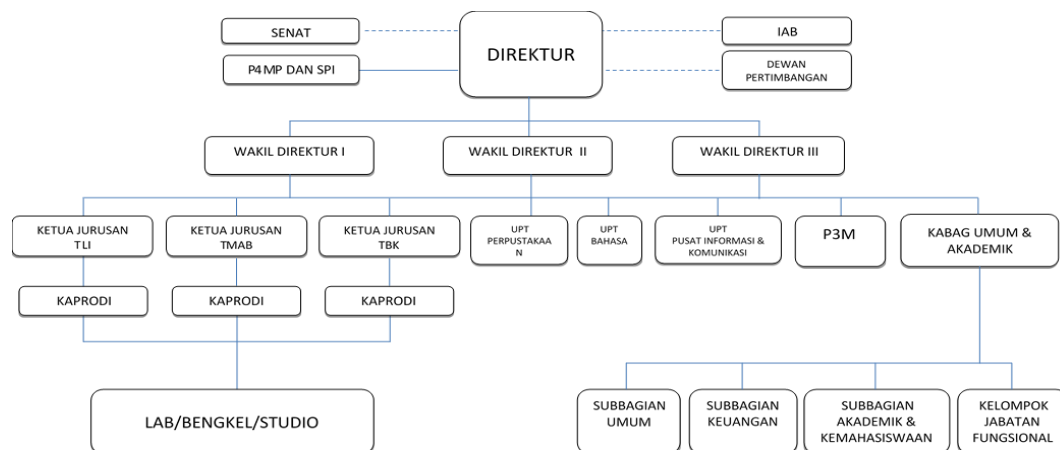
berbasis kompetensi, pengembangan kompetensi *soft-skill* mahasiswa, serta pengembangan kapasitas dan kinerja *Career Center* POLTERA;

- c. *Academic Atmosphere* melalui penyampaian nilai etika dan perilaku penunjang visi dan misi, peningkatan reward Sivitas Akademika dan Karyawan POLTERA, peningkatan kinerja pusat penelitian, pengabdian dan HaKI, serta pengembangan sistem proses belajar mengajar;
- d. Manajemen Internal melalui pengembangan manajemen dan organisasi, pengembangan sistem manajemen pengambil keputusan, peningkatan sistem manajemen keuangan, serta pembentukan satuan pengawas internal;
- e. Peningkatan *Sustainability* melalui peningkatan kapasitas kinerja divisi pemasaran dan pengembangan pusat bisnis; dan
- f. Peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui peningkatan kualitas input, peningkatan kompetensi dosen, dan peningkatan sistem evaluasi akademik.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, diperlukan adanya struktur organisasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun susunan organisasi dan tata kerja Poltera mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian,

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura adalah terdiri atas direktur, senat, satuan pengawasan dan dewan pertimbangan.

Berikut merupakan struktur organisasi Politeknik Negeri Madura:



Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik Negeri Madura

Politeknik Negeri Madura merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Direktur. Dalam mengemban amanat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, susunan organisasi Politeknik Negeri Madura berdasarkan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 dikemukakan dalam table berikut ini:

Tabel 5. Susunan Organisasi Politeknik Negeri Madura

No	Jabatan/Unit Kerja	Tugas Pokok
1	Direktur	Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi Poltera serta hubungannya dengan lingkungan; dan membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat.
2	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
3	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

No	Jabatan/Unit Kerja	Tugas Pokok
4	Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi	Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan sistem informasi.
5	Satuan Pengawas Internal	Menyusun program pengawasan, melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program Politeknik Negeri Madura, menyusun laporan hasil pengawasan ke Direktur, melaksanakan evaluasi hasil pengawasan
6	Bagian Umum dan Akademik	Melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat di lingkungan Poltera serta pemberian layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, dan kerja sama.
7	Subbagian Umum	Melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Madura.
8	Subbagian Keuangan	Melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
9	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	Melakukan urusan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi, pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan mahasiswa, alumni serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, dan

No	Jabatan/Unit Kerja	Tugas Pokok
		administrasi kegiatan kerja sama.
10	Jurusan Teknik Bangunan Kapal	Melaksanakan pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan Teknik Bangunan Kapal.
11	Jurusan Teknik Mesin Alat Berat	Melaksanakan pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan Teknik Mesin Alat Berat.
12	Jurusan Teknik Listrik Industri	Melaksanakan pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan Teknik Listrik Industri.
13	Jurusan Keperawatan	Melaksanakan pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan Keperawatan.
14	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15	Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
16	Kepala UPT Perpustakaan	Melaksanakan pemberian layanan kepastakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17	Kepala UPT Bahasa	Melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan tes Bahasa.
18	Kepala UPT Pusat Informasi dan Komunikasi	Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan jaringan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan serta memberikan layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi
19	Kepala UPT Laboratorium/Bengkel /Studio	Melaksanakan layanan laboratorium/bengkel/studio untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta

No	Jabatan/Unit Kerja	Tugas Pokok
		pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026 Semester I Politeknik Negeri Madura merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas Politeknik Negeri Madura.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026 Semester I ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Negeri Madura . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

Politeknik Negeri Madura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Negeri Madura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026 Semester I telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026 Semester I berdasarkan:

1. Buku Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening KUN, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat

timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan

kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- 3) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 4) Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Termasuk di dalam Belanja Dibayar Dimuka adalah Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemda/lembaga penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau Berita Acara Serah Terima.
- 5) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang timbul dari tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa diakui apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran UKT tetapi mahasiswa tersebut belum mendapatkan pelayanan pendidikan secara penuh.
- 6) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 7) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 9) Piutang yang timbul dari tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa diakui apabila timbul tagihan dan mahasiswa tersebut telah mendapatkan pelayanan pendidikan secara penuh.

- 10) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Tabel 6. Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 11) Piutang Lainnya merupakan transaksi pengembalian belanja TAYL, dimana sampai dengan tanggal 31 Desember TAYL, kas tersebut masih berada di pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara Pengeluaran.
- 12) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian

Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- 13) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO diterapkan mulai tahun 2021 secara prospektif, setelah Pemerintah menerapkan Metode Harga Perolehan Terakhir pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 2) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- 4) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 7) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 8) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- 2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 3) Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- 4) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- 2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 3) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 4) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- 5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- 7) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 9. Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0.5 %
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2026 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2026.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp5.209.088.140 atau mencapai 81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.470.700.000. Pendapatan Negara dan Hibah Politeknik Negeri Madura terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain.

Selama periode berjalan, Politeknik Negeri Madura sudah 9 kali melakukan revisi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Uraian	Anggaran Tahun 2026				
	Dipa Awal	REV. 1	REV. 2	REV. 3	REV. 4
Pendapatan					
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Pendapatan Biaya Pendidikan	6.460.700.000	6.460.700.000	6.460.700.000	6.460.700.000	6.460.700.000
Jumlah Pendapatan	6.470.700.000	6.470.700.000	6.470.700.000	6.470.700.000	6.470.700.000
Belanja					
Belanja Pegawai	16.618.630.000	16.618.630.000	16.618.630.000	16.618.630.000	16.618.630.000
Belanja Barang	12.655.508.000	12.480.949.000	12.480.949.000	12.450.439.000	12.450.439.000
Belanja Modal	54.036.522.000	54.036.522.000	54.036.522.000	79.945.907.000	79.945.907.000
Jumlah Belanja	83.310.660.000	83.136.101.000	83.136.101.000	109.014.976.000	109.014.976.000

Uraian	Anggaran Tahun 2026				
	REV. 5	REV. 6	REV. 7	REV. 8	REV. 9
Pendapatan					
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Pendapatan Biaya Pendidikan	6.460.700.000	6.460.700.000	6.460.700.000	6.460.700.000	6.460.700.000
Jumlah Pendapatan	6.470.700.000	6.470.700.000	6.470.700.000	6.470.700.000	6.470.700.000
Belanja					
Belanja Pegawai	16.618.630.000	16.618.630.000	16.618.630.000	16.618.630.000	16.618.630.000
Belanja Barang	12.396.661.000	12.396.661.000	12.396.661.000	12.396.661.000	12.396.661.000
Belanja Modal	79.945.907.000	79.945.907.000	79.945.907.000	79.945.907.000	79.945.907.000
Jumlah Belanja	108.961.198.000	108.961.198.000	108.961.198.000	108.961.198.000	108.961.198.000



Realisasi
Pendapatan
Rp5.209.088.140

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp5.209.088.140, atau mencapai 80.50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.470.700.000,-. Pendapatan Politeknik Negeri Madura terdiri dari Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, Penerimaan dari Pengembalian Belanja tahun yang lalu dan Pendapatan Jasa Giro Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang disalurkan melalui Bank Penyalur serta Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 11.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2026

Uraian	PER 30 Juni 2026		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari pengelolaan BMN	-	10.000.000	100
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	10.000.000	33.600.000	336,00
Pendapatan Biaya Pendidikan	6.460.700.000	5.149.893.000	79,71
Pendapatan Iuran dan Denda	-	157.600	-
Pendapatan Lain-lain	-	15.437.540	100
Jumlah	6.470.700.000	5.209.088.140	80,50

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp5.209.088.140 atau mencapai 80.50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.470.700.000. Pendapatan terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp5.149.893.000 atau 79.71 persen dari total Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pendapatan Negara Politeknik Negeri Madura terdiri dari:

- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan;
- Pendapatan Biaya Pendidikan;
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah;



- d) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu;
- e) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu;
- f) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

Rincian realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 12. Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	% Naik/Turu
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	33.600.000	15.000.000	55,36
Pendapatan Biaya Pendidikan	5.149.893.000	3.864.479.000	24,96
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	14.358.440	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.079.100	5.754.082	(433,23)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	157.600	-	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000	-
Jumlah	5.209.088.140	3.885.233.082	100,00

Berdasarkan Tabel Realisasi Pendapatan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar **Rp33.600.000** berupa:
 - a. Pendapatan pendaftaran ujian/seleksi masuk mahasiswa baru Jalur Mandiri pada Bulan April 2026 sebesar **Rp2.800.000** dari 14 pendaftar;
 - b. Pendapatan pendaftaran ujian/seleksi masuk mahasiswa baru Jalur Mandiri pada bulan Mei 2026 sesuai dengan Simponi sebesar **Rp11.200.000** dari 56 pendaftar;

- c. Pendaftaran pendapatan pendaftaran ujian/seleksi masuk mahasiswa baru Jalur Mandiri Konsorsium Madura sesuai dengan Simponi sebesar **Rp19.600.000** sebanyak 98 pendaftar.
2. Pendapatan Biaya Pendidikan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar **Rp5.149.893.000**. merupakan pendapatan biaya pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan penjabaran sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Januari 2026, Politeknik Negeri Madura menerima pendapatan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa lama semester ganjil sesuai Nota Konfirmasi Penerimaan Negara sebesar Rp26.580.000. Selain itu, terdapat penerimaan dari pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp2.500.000. Dengan demikian, total pendapatan yang diterima pada bulan Januari 2026 adalah sebesar **Rp29.080.000**, yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara, dengan penyetoran terakhir dilakukan pada 30 Januari 2026;
 - b. Pada bulan Februari 2026, Politeknik Negeri Madura menerima pendapatan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Mahasiswa semester Genap II, IV, VI, VIII, X sebesar Rp2.016.900.000. Selain itu, terdapat penerimaan dari pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp46.250.000. Dengan demikian, total pendapatan yang diterima pada bulan Februari 2026 adalah sebesar **Rp2.063.150.000**, yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara, dengan penyetoran terakhir dilakukan pada 28 Februari 2026;
 - c. Pada bulan Maret 2026, Politeknik Negeri Madura menerima pendapatan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Mahasiswa semester Genap II, IV, VI, VIII sebesar Rp1.281.973.000. Selain itu, terdapat penerimaan dari

pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp30.250.000. Dengan demikian, total pendapatan yang diterima pada bulan Maret 2026 adalah sebesar **Rp1.312.223.000**, yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara, dengan penyetoran terakhir dilakukan pada 31 Maret 2026;

- d. Pada bulan April 2026, Politeknik Negeri Madura menerima pendapatan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Mahasiswa semester Genap II, IV, VI, VIII, dan mahasiswa baru sebesar Rp536.840.000. Selain itu, terdapat penerimaan dari pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp19.500.000. Dengan demikian, total pendapatan yang diterima pada bulan April 2026 adalah sebesar **Rp556.340.000**, yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara, dengan penyetoran terakhir dilakukan pada 30 April 2026;
- e. Pada bulan Mei 2026, Politeknik Negeri Madura menerima pendapatan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Mahasiswa semester Genap II, IV, VI, VIII, dan mahasiswa baru sebesar Rp50.700.000. Selain itu, terdapat penerimaan dari pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp8.000.000. Dengan demikian, total pendapatan yang diterima pada bulan Mei 2026 adalah sebesar **Rp58.700.000**, yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara, dengan penyetoran terakhir dilakukan pada 30 Mei 2026;
- f. Pada bulan Juni 2026, Politeknik Negeri Madura menerima pendapatan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Mahasiswa semester Genap II, IV, VI, VIII, dan mahasiswa baru sebesar Rp735.900.000. Selain itu, terdapat penerimaan dari pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp394.500.000. Dengan demikian, total

pendapatan yang diterima pada bulan Mei 2026 adalah sebesar **Rp1.130.400.000**, yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara, dengan penyetoran terakhir dilakukan pada 30 Juni 2026;

3. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar **Rp1.079.100** dengan rincian:

a. Pengembalian Belanja Barang atas Perjalanan Dinas mengantar BEM kunjungan Studi Banding di PPNS tanggal 18 Oktober 2025 ST 2831/PL34/HM.00.06/202 sesuai simponi NTB 769325511414, NTPN 9974C0NA0N13TG56 sebesar **Rp1.079.100** yang disetor tanggal 08 April 2026.

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar **Rp14.358.440** dengan rincian:

1. Pengembalian Belanja Pegawai atas Selisih Tunjangan Kinerja Tenaga Pendidik PPPK bulan Januari-Juni, THR, dan Gaji ke-13 Tahun 2025 sesuai simponi NTB 939666214602, NTPN 2544749001E0ECBG sebesar **Rp13.356.416** yang disetor tanggal 21 Mei 2026;

2. Pengembalian Belanja Pegawai atas Selisih Tunjangan Kinerja Tenaga Pendidik PPPK bulan Januari-Juni, THR, dan Gaji ke-13 Tahun 2025 sesuai simponi NTB 582028214788, NTPN 998A049001E0E950 sebesar **Rp130.165** yang disetor tanggal 21 Mei 2026;

3. Pengembalian Belanja Pegawai atas Selisih Tunjangan Kinerja Tenaga Pendidik PPPK bulan Januari-Juni, THR, dan Gaji ke-13 Tahun 2025 sesuai simponi NTB 987671214961, NTPN 8234B7QLVBNI28TU sebesar **Rp487.537** yang disetor tanggal 21 Mei 2026;

4. Pengembalian Belanja Pegawai atas Selisih Tunjangan Kinerja Tenaga Pendidik PPPK bulan Januari-Juni, THR, dan Gaji ke-13

Tahun 2025 sesuai simponi NTB 987671214961, NTPN 8234B7QLVBNI28TU sebesar **Rp384.322** yang disetor tanggal 21 Mei 2026;

5. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar **Rp157.600** berupa Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Peralatan Penunjang Penguatan Kepakaran Bidang Electric Vehical Sesuai BAST Nomor 2596/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 23 Juni 2026 dan BAP Nomor 2597/PL34.PPK /KU.01.02/2026 tanggal 23 Juni 2026
6. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa sewa lahan untuk ATM Mandiri sebesar **Rp10.000.000.**

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Rp40.435.121.867

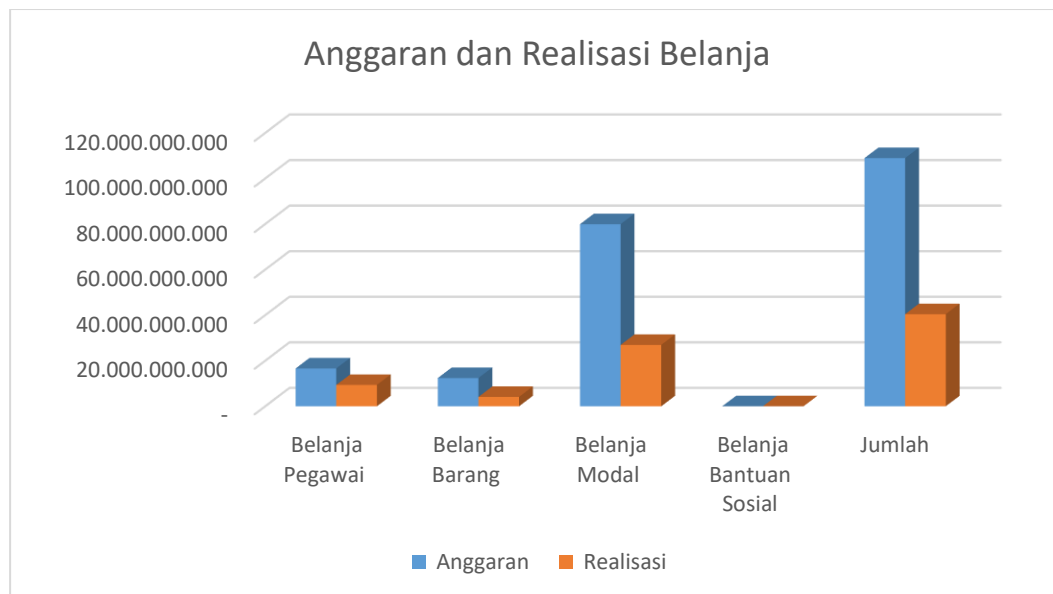
Realisasi Belanja Politeknik Negeri Madura pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp40.435.121.867 atau 37 persen dari anggaran belanja sebesar Rp108.938.198.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2026

Uraian	30 Juni 2026		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	16.618.630.000	9.373.661.466	56
Belanja Barang	12.396.661.000	4.115.573.425	33
Belanja Modal	79.922.907.000	26.945.886.976	34
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Pegawai Kotor	108.938.198.000	40.435.121.867	37
Pengembalian		-	-
Jumlah	108.938.198.000	40.435.121.867	37

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026

Tabel 14. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	9.373.661.466	5.477.050.781	41,57
Belanja Barang	4.115.573.425	2.966.675.703	27,92
Belanja Modal	26.945.886.976	474.503.060	98,24
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	40.435.121.867	8.918.229.544	98,24

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Pegawai pada Semester I Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 41,57 persen, Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar 27,92 persen, dan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 98,24 persen dibandingkan dengan periode 30 Juni 2025 pada tahun sebelumnya. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada Belanja Modal sebagai dampak dialokasikannya dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada Politeknik Negeri Madura pada Tahun Anggaran 2026, sehingga realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami peningkatan yang signifikan.



Realisasi
Belanja
Pegawai
Rp9.373.661.
466

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp9.373.661.466 dan Rp5.477.050.781.



Tabel 15. Perbandingan Rincian Belanja Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	URAIAN	30 Juni 2026			30 Juni 2025			Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
51	BELANJA PEGAWAI	6.176.684.000	3.697.055.403	59,86	4.736.071.000	3.142.533.954	66,35	17,64567884
51	BELANJA PEGAWAI							-
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							-
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.685.970.000,	2.249.905.920,	61,04	2.850.000.000,	1.952.520.740,	68,51	297.385.180
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	68.000,	39.891,	58,66	250.000,	31.620,	12,65	8.271
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	235.796.000,	141.911.874,	60,18	224.821.000,	129.389.218,	57,55	12.522.656
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	70.965.000,	42.819.144,	60,34	53.392.000,	38.093.134,	71,35	4.726.010
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14.100.000,	0,	-	14.100.000,	0,	-	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	466.986.000,	286.744.000,	61,40	311.500.000,	261.474.000,	83,94	25.270.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	26.000.000,	20.467.234,	78,72	21.000.000,	18.179.662,	86,57	2.287.572
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	213.675.000,	130.138.740,	60,90	192.638.000,	113.626.980,	58,98	16.511.760
511129	Belanja Uang Makan PNS	594.859.000,	210.857.000,	35,45	600.000.000,	224.263.000,	37,38	-13.406.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	70.265.000,	47.830.000,	68,07	90.370.000,	30.630.000,	33,89	17.200.000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	798.000.000,	566.341.600,		378.000.000,	374.325.600,	99,03	192.016.000
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	982.296.000	451.581.671	45,97	520.800.000	429.493.200	82,47	22.088.471
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	982.296.000,	451.581.671,	45,97	520.800.000,	429.493.200,	-	22.088.471
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.910.003.000	1.470.700.905	77,00	1.121.201.000	940.676.586	83,90	530.024.319
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							-
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.210.876.000,	1.088.847.034,	89,92	825.813.000,	694.773.761,	84,13	394.073.273
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24.000,	17.226,	71,78	14.000,	8.587,	61,34	8.639
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	172.232.000,	64.303.159,	37,34	59.123.000,	41.740.378,	70,60	22.562.781
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	26.245.000,	21.965.179,	83,69	17.666.000,	14.686.384,	83,13	7.278.795
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	144.312.000,	103.688.750,	71,85	92.960.000,	79.731.666,	85,77	23.957.084
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	63.385.000,	60.633.645,	95,66	45.625.000,	36.004.810,	78,91	24.628.835
511628	Belanja Uang Makan PPPK	268.929.000,	119.343.000,	44,38	80.000.000,	73.731.000,	29,16	45.612.000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	24.000.000,	11.902.912,	49,60	-	-	-	11.902.912
5122	Belanja Lembur	65.236.000	5.463.000	8,37	75.000.000	8.700.000	11,60	(3.237.000)
5122	Belanja Lembur							-
512211	Belanja Uang Lembur	34.368.000,	1.779.000,	5,18	50.000.000,	5.025.000,	10,05	-3.246.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	30.868.000,	3.684.000,	11,93	25.000.000,	3.675.000,	14,70	9.000
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	7.484.411.000	3.761.365.588	50,26	6.481.244.000	955.647.041	14,74	2.805.718.547
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6.217.637.000	2.996.420.785,	48,19	5.545.403.000,	681.906.159,	12,30	2.314.514.626
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.266.774.000,	764.944.803,	60,39	935.841.000,	273.740.882,	29,25	491.203.921
	Pengembalian	-	12.505.101	(100,00)	-	-	-	12.505.101
	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	3.117.080,		-	-	-	3.117.080
	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	9.388.021,	-	-	-	-	9.388.021
	Total Neto	16.618.630.000	9.373.661.466	56,40	12.934.316.000	5.477.050.781	42,35	3.896.610.685,00

Berdasarkan Tabel 15, realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 42 persen senilai Rp3.896.610.685 dibandingkan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi belanja 30 Juni 2026 mengalami peningkatan sebesar 42 persen. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya peningkatan jabatan yang berpengaruh dengan honor yang diterima.
2. Adanya SK kenaikan gaji berkala pegawai PNS
3. Adanya perubahan kelas jabatan tenaga pendidik yang berpengaruh terhadap tunjangan kinerja
4. Adanya SK penambahan sertifikasi dosen.
5. Adanya pegawai CPNS menjadi PNS pada bulan Juni 2026

Tabel 16 Daftar Pegawai Juli 2026

Status Kepegawaian	Dosen (Orang)	Tenaga Kependidikan (Orang)	Jumlah (Orang)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	56	28	84
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0	6	6
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	18	24	42
Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPW)	1	6	7
Pegawai Perjanjian Kerja Harian Lepas PKHL Dosen Tidak Tetap	1	0	1
Jumlah	76	64	140

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai Politeknik Negeri Madura per 30 Juni 2026 sebanyak 139 orang, yang terdiri atas 76 dosen dan 64 tenaga kependidikan. Berdasarkan status kepegawaian, pegawai terdiri atas 84 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang
Rp4.115.573.425

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp4.115.573.425 dan Rp2.966.675.703. Realisasi belanja barang per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 23 persen jika dibandingkan dengan periode 30 Juni 2025.

Tabel 17. Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN BELANJA	30 Juni 2026			30 Juni 2025			Kenaikan/Penurunan
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
Barang Operasional	3.099.066.000	1.304.971.732	42,11	3.308.671.000	1.133.645.084	0,00	171.326.648
Barang Non Operasional	4.572.183.000	979.946.957	21,43	4.193.565.000	588.196.304	0,00	391.750.653
Belanja Barang Persediaan	1.000.300.000	728.649.819	72,84	1.258.298.000	-	0,00	728.649.819
Belanja Jasa	1.924.131.000	561.775.681	29,20	2.274.794.000	953.794.526	0,00	(392.018.845)
Belanja Pemeliharaan	417.568.000	154.505.389	37,00	537.513.000	109.983.434	0,00	44.521.955
Perjalanan Dalam Negeri	1.217.413.000	363.574.849	29,86	1.009.054.000	183.699.755	0,00	179.875.094
Perjalanan Luar Negeri	166.000.000	23.575.248	14,20	55.479.000	-	0,00	23.575.248
Belanja Barang u/ diserahkan kpd Masy.	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang Lainnya u/ diserahkan kpd Masy.	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	12.396.661.000	4.116.999.675	33,21	12.637.374.000	2.969.319.103	0,00	1.147.680.572
Pengembalian Belanja	-	1.426.250	-	-	2.643.400	0,00	(1.217.150)
Jumlah Belanja	12.396.661.000	4.115.573.425	33,20	12.637.374.000	2.966.675.703	0,00	1.148.897.722

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan terdapat Kenaikan realisasi Belanja Barang terutama berasal dari Belanja Operasional yang meningkat sebesar Rp171.328.648, Belanja Non Operasional sebesar Rp391.736.623, Belanja Barang Persediaan sebesar Rp728.649.819, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar

Rp179.875.094. Selain itu, terdapat peningkatan pada Belanja Pemeliharaan sebesar Rp44.521.955 dan Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp23.575.248. Sementara itu, realisasi Belanja Jasa mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dapat dijabarkan dalam rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi pada komponen belanja barang operasional untuk periode yang berakhir sampai 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.303.545.482 atau 942.06 persen dari alokasi anggaran sebesar 3.099.066.000, Rincian belanja barang operasional dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 18. Realisasi Belanja Barang Operasional Tahun 2026

Rincian belanja Operasional	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Keperluan perkantoran	2.294.471.000,	986.311.132,	42,99
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.591.000,	613.350,	23,67
Belanja Honor Operasional Satuan Kinerja	802.004.000,	318.047.250,	39,66
Belanja barang Operasional- Penanganan pandemi Covid 19	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	3.099.066.000	1.304.971.732	42,11
Pengembalian belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1.426.250	-
Jumlah Belanja	3.099.066.000	1.303.545.482	42,06

- b. Realisasi pada komponen belanja barang non operasional adalah digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun belanja barang operasional. Belanja barang non operasional lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program dan juga untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja barang non operasional lainnya tidak menghasilkan barang persediaan. Realisasi belanja barang non operasional untuk periode yang

berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp979.946.957 atau 21.43 persen dari alokasi sebesar Rp4.572.183.000 Rincian belanja barang non operasional satuan kerja kode UAKPA 139.03.0500.693499 Tahun 2026 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 19. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun 2026

Rincian belanja Non Operasional	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bahan	1.496.016.000,	127.662.600,	8,53
Belanja Honor Output Kegiatan	1.251.757.000,	389.292.322,	31,10
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.824.410.000,	462.992.035,	25,38
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	4.572.183.000	979.946.957	21,43
Pengembalian Belanja Bahan	0	0	-
Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	0	-
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja	4.572.183.000	979.946.957	21,43

- c. Realisasi pada komponen belanja persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp728.649.819 atau 72.84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.000.300.000. Rincian belanja persediaan dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 20. Realisasi Belanja Barang Persediaan Konsumsi Tahun 2026

Rincian belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja barang persediaan Konsumsi	1.000.300.000	728.649.819	72,84
Jumlah Belanja	1.000.300.000	728.649.819	72,84

- d. Realisasi pada komponen belanja jasa diantaranya belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber,

pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Realisasi belanja jasa satuan kerja kode UAKPA 139.03.0500.693499 untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.924.131.000 atau 29.20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp561.775.681 Rincian belanja jasa Politeknik Negeri Madura untuk periode yang berakhir sampai 30 Juni 2026 dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 21. Realisasi Belanja Jasa Tahun 2026

Belanja Jasa	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langgan Listrik	480.000.000,	184.568.131,	38,45
Belanja Langgan Telpon	3.600.000,	1.834.550,	50,96
Belanja Langgan Air	44.400.000,	19.246.000,	43,35
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	909.176.000,	338.050.000,	37,18
Belanja Sewa	146.000.000,	0,	-
Belanja Jasa Profesi	339.705.000,	16.827.000,	4,95
Belanja Jasa Lainnya	1.250.000	1.250.000	-
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	1.924.131.000	561.775.681	29,20

- e. Realisasi pada komponen belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp154.505.389 atau 37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp417.568.000 Rincian belanja pemeliharaan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2026

Rincian belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74.480.000,	58.102.606,	78,01
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	343.088.000,	96.402.783,	28,10
Jumlah Belanja Kotor	417.568.000	154.505.389	37,00

- f. Realisasi pada komponen belanja perjalanan dalam negeri untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp363.574.849 atau 29.86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.217.413.000 Rincian belanja perjalanan dalam negeri dapat dijabarkan pada tabel pada berikut ini:

Tabel 23. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2026

Rincian belanja Perjalanan Dalam Negeri	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Perjalanan Biasa	1.138.383.000,	363.574.849,	31,94
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,	0,	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	79.030.000,	0,	-
Jumlah Belanja Kotor	1.217.413.000	363.574.849	29,86

- g. Realisasi pada komponen belanja perjalanan luar negeri untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp23.575.248 atau 14.20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp166.000.000 Rincian belanja perjalanan dalam negeri dapat dijabarkan pada tabel pada berikut ini:

Tabel 24. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2026

Rincian belanja Perjalanan Dalam Negeri	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	166.000.000,	23.575.248,	14,20
Jumlah Belanja Kotor	166.000.000	23.575.248	14,20

B.5. Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah Per 30 Juni 2026

B.6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin Rp
234.527.260

Realisasi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp234.527.260 dan Rp0 Realisasi per 30 Juni 2025.

Tabel 25 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.527.260	0	100,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis PM	0	0	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan PM	0	0	-
Belanja Modal Pemasangan PM	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan PM		0	-
Jumlah Belanja	234.527.260	0	100,00

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin per jenis komponen belanja UAKPA 139.03.0500.693499 Politeknik Negeri Madura untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 26. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026

Rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan Peralatan dan mesin	16.939.040.000	234.527.260	1,38
Jumlah Belanja Kotor	16.939.040.000	234.527.260	1,38

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja modal peralatan dan mesin berupa:

1. Pengadaan peralatan pendukung pembelajaran sebesar **Rp76.907.260** berupa Pembayaran Belanja Modal berupa

Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran (Pembelian Air Conditioning (AC), Magnetic Particle (Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan), LCD Monitor, Air Conditioning (AC), CCTV - Camera Control Television System) sesuai BAST Nomor 2103/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 21 Mei 2026 dan BAP Nomor 2104/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 21 Mei 2026, No SPM 00221T/693499/2026 dan No SP2D 260360000008831;

2. Pengadaan sebesar **Rp157.620.000** berupa Pengadaan Peralatan Penunjang Penguatan Kepakaran Bidang Electric Vehical (Pembelian Engine Dynamometer) Sesuai BAST Nomor 2596/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 23 Juni 2026 dan BAP Nomor 2597/PL34.PPK /KU.01.02/2026 tanggal 23 Juni 2026, No SPM 00281T/693499/2026 dan No SP2D 260360000011306 tanggal 30 Juni 2026;

B.7. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp26.711.359.716 dan Rp474.503.060. realisasi per 30 Juni 2026:

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.036.095.000	12.150.312.594	53,33
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	34.250.000	320.324.961	(835,26)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	641.014.716	545.337.442	14,93
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja	26.711.359.716	13.015.974.997	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar **Rp26.711.359.716** berupa:

1. Pembayaran Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-1 BAKP Nomor 586/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 2 Februari 2026 dan BAP Nomor 587/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 2 Februari 2026 sebesar **Rp 1.720.202.000,** No SPM00053T/693499/2026, No SP2D 260360000002106.;
2. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-2 BAKP Nomor 811/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 24 Februari 2026 dan BAP Nomor 812/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 24 Februari 2026 sebesar **Rp 1.903.065.000,** No SPM 00056T/693499/2026, No SP2D 260360000002522.;
3. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-3 BAKP Nomor 1006/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 9 Maret 2026 dan BAP Nomor 1007/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 9 Maret 2026 sebesar **Rp 2.996.167.000,** No SPM 00116T/693499/2026, No SP2D 260360000004242.;
4. Pembayaran Belanja Modal berupa Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Kesehatan Poltera TA 2025 BAKP Nomor 1052/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 12 Maret 2026 dan BAP Nomor 1053/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 12 Maret 2026 sebesar **Rp 270.218.612,** No SPM 00122T/693499/2026, No SP2D 260360000004589.;

5. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-4 BAKP Nomor 1636/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 20 April 2026 dan BAP Nomor 1637/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 20 April 2026 sebesar **Rp4.535.579.000**, No SPM 00163T/693499/2026, No SP2D 260360000006439.;
6. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-5 BAKP Nomor 2161/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 25 Mei 2026 dan BAP Nomor 2162/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 25 Mei 2026 sebesar **Rp6.868.861.000**, No SPM 00224T/693499/2026, No SP2D 260360000009232.;
7. Pembayaran Belanja Modal berupa Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Kesehatan Poltera TA 2025 Sesuai BAKP Nomor 2643/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 26 Juni 2026 dan BAP Nomor 2644/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 26 Juni 2026 sebesar **Rp370.796.104**, No SPM 00285T/693499/2026, No SP2D 260360000011414.
8. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-6 Sesuai BAKP Nomor 2641/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 29 Juni 2026 dan BAP Nomor 2642/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 29 Juni 2026 sebesar **Rp8.012.221.000**, No SPM 00284T/693499/2026, No SP2D 260360000011413.;

9. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Bulan Januari s.d Mei sebesar **Rp 34.250.000** (rincian terlampir).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp714.784.012

C.1. Aset lancar

Aset aset merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp714.784.012 dan Rp979.591.660.

Rincian Aset Lancar pada Politeknik Negeri Madura 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 28 Rincian Aset Lancar
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No.	Aset Lancar	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 101.000.000	Rp -	100
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	Rp -	Rp 2.250.000	(100)
3	Piutang Bukan Pajak	Rp 2.250.000	Rp 23.750.000	(90.53)
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	Rp (11.250)	Rp (118.750)	(90.53)
5	Piutang Bukan Pajak (Netto)	Rp 2.238.750	Rp 23.631.250	(90.53)
6	Persediaan	Rp 611.545.262	Rp 953.710.410	(35.88)
	Jumlah	Rp 714.784.012	Rp 979.591.660	(27,03)

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp101.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang

berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 sebesar Rp101.000.000 yang merupakan uang muka dari KPPN Pamekasan Wilayah Madura.

*Pendapatan Yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

C.1.2 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang telah menjadi hak entitas dalam periode berjalan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima kasnya. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan Yang Masih harus Diterima per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp2.250.000.

Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Politeknik Negeri Madura adalah nihil (Rp0). Hal ini disebabkan karena seluruh hak atas pendapatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sebelumnya masih belum diterima telah dilunasi oleh mahasiswa yang bersangkutan sebelum tanggal pelaporan. Dengan demikian, sampai dengan 30 Juni 2026 tidak terdapat lagi piutang pendapatan yang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

*Piutang Bukan
Pajak Rp2.250.000*

C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak pada Politeknik Negeri Madura merupakan hak atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari layanan pendidikan dan/atau layanan lainnya, seperti Iuran Pengembangan Institusi (IPI), Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan jasa layanan pendidikan, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pembayarannya.

NRP	Nama	Prodi	Alamat	No Hp	Jumlah
33212501054	Raafi Putra Indrawan	D3 Teknik Mesin Alat Berat	Jl. Makboel Polagan Sampang Madura jawa timur	081230285353	1.000.000
33312501025	Faiqun Najib	D3 Teknik Bangunan Kapal	Jl. Permata RT 3/ RW 1, Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang	081932805671	1.250.000
Jumlah					2.250.000

Tabel di atas merupakan Piutang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) merupakan tagihan kepada mahasiswa yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan sampai dengan 30 Juni 2026.

Piutang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada Politeknik Negeri Madura per 30 Juni 2026 sebesar Rp2.250.000, yang merupakan hak tagih atas Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dari mahasiswa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum melunasi kewajiban pembayarannya. Saldo piutang tersebut berasal dari 2 (dua) mahasiswa, yaitu mahasiswa Program Studi D3 Teknik Mesin Alat Berat sebesar Rp1.000.000 dan mahasiswa Program Studi D3 Teknik Bangunan Kapal sebesar Rp1.250.000. Piutang IPI diakui berdasarkan basis akrual dan disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang diperkirakan dapat ditagih.

Politeknik Negeri Madura telah melakukan pemantauan atas piutang tersebut dan berupaya melakukan penagihan secara aktif. Seluruh piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih, dan apabila terdapat indikasi tidak tertagih, akan dilakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp 11.250)

C.1.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan estimasi kerugian atas piutang yang berpotensi tidak dapat ditagih. Penyisihan ini dibentuk berdasarkan hasil penelaahan terhadap kolektibilitas piutang, dengan mempertimbangkan antara lain umur piutang, riwayat pembayaran, serta kondisi pihak yang berutang.

Penyisihan diakui sebagai pengurang nilai tercatat piutang dan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pembentukan dan penyesuaian penyisihan dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp 11.250) dan (Rp 118.750)

C.1.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan Pajak (Netto) merupakan nilai bersih piutang atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Berdasarkan tabel, Piutang Bukan Pajak (Bruto) sebesar Rp2.250.000 dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp11.250, sehingga diperoleh Piutang Bukan Pajak (Netto) sebesar Rp2.238.750.

Piutang tersebut terutama berasal dari tagihan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang telah jatuh tempo. Penyisihan piutang dibentuk sebagai estimasi atas potensi piutang yang tidak dapat ditagih, sehingga nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan mencerminkan jumlah yang dapat direalisasikan.

Persediaan
Rp611.545.262

C.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bantuan sosial. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang

sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang persediaan.

Nilai persediaan pada tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 30 juni 2025

No.	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	Barang Konsumsi	Rp 589.335.439	Rp -
2	Barang Untuk Pemelih	Rp 940.190	Rp -
3	Suku Cadang	Rp 21.269.633	Rp -
4	Aset Tetap untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -
5	Barang Persediaan Lainnya untuk	Rp -	Rp -
6	Bahan Baku	Rp -	Rp -
7	Persediaan Strategis untuk berjaga-jaga	Rp -	Rp -
8	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp 611.545.262	Rp -

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp.227.825.843.437

Aset Tetap adalah merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp227.825.843437 dan Rp205.158.095.912.

Rincian Aset Tetap Politeknik Negeri Madura per 30 Juni 2026 tersaji pada aset berikut ini:

Tabel 30 Rincian Aset Tetap
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No	Jenis	31 Des 2025	31 Des 2025	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tanah	59.185.191.947	59.185.191.947	-
2	Peralatan dan Mesin	83.258.218.090	83.384.970.630	(126.752.540)
3	Gedung dan Bangunan	122.920.559.616	122.920.559.616	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	531.123.164	531.123.164	-
5	Aset Tetap Lainnya	1.726.243.533	1.726.243.533	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	39.727.334.713	13.015.974.997	26.711.359.716
Jumlah		307.348.671.063	280.764.063.887	26.584.607.176
Akumulasi Penyusutan		(79.522.827.626)	(75.605.967.975)	(3.916.859.651)
Nilai Buku Aset Tetap		227.825.843.437	205.158.095.912	22.667.747.525

Tanah
Rp59.086.093.700

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Politeknik Negeri Madura dan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp59.086.093.700 dan Rp0. terdapat kenaikan nilai aset tetap Tanah. Rincian nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Politeknik Negeri Madura per 30 Juni 2026 sebesar Rp59.086.093.700 dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai tanah sebesar Rp59.086.093.700 bersumber dari:
 - a. Tanah a.n Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hak Pakai No.00091, letak tanah Kelurahan Barurambat Timur dengan surat ukur tanggal 23/08/2023 nomor 02227/BarurambatKota/2023 Luas: 2759 M².
 - b. Tanah a.n Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hak Pakai No.00030, surat ukur tanggal 25/11/2009 nomor 00017/Taddan/2009 Luas: 51.818 M².
 - c. Tanah a.n Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hak Pakai No.00090, surat ukur tanggal 23/08/2023 nomor 02226/Barurambat Timur/2023 Luas: 5495 M².
 - d. Tanah a.n Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hak Pakai No.00089, surat ukur tanggal 23/08/2023 nomor 01137/Ceguk/2023 Luas: 3743 M².
 - e. Tanah a.n Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hak Pakai No.00040, surat ukur tanggal 07/11/2023 nomor 01324/Taddan/2023 Luas: 30.408 M².

Tabel 31 Rincian Tanah

Nama Satker	Luas Tanah M2	Nilai Tanah	Alamat Lokasi Tanah	Nomor Dokumen Kepemilikan
				Sertifikat
2	4	5	6	7
Politeknik Negeri Madura	2.759	1.185.132.000	Pamekasan	SHP No. 00091
Politeknik Negeri Madura	51.818	47.521.377.247	Sampang	SHP No. 00030
Politeknik Negeri Madura	5.495	206.062.500	Pamekasan	SHP No 00090
Politeknik Negeri Madura	3.743	1.146.400.000	Pamekasan	SHP No. 00089
Politeknik Negeri Madura	30.408	9.126.220.200	Sampang	SHP No 00040
		59.185.191.947		

Nilai asset tetap Tanah per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp59.185.191.947 dan Rp0. Rincian Tanah untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 32 Rincian Tanah per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	%
Tanah	59.185.191.947	-	100
Total	59.185.191.947	-	100

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp83.258.218.090

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki per 30 Juni 2026 sebesar Rp83.258.218.090 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2026

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026		83.384.970.630
Mutasi Tambah:		234.527.260
	Penambahan Saldo Awal	
	Pembelian	234.527.260
	Transfer Masuk	-
	Hibah	-
	Penyelesaian Pembangunan dg KDP	-
	Reklasifikasi Masuk	-
	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Te	-
	Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi Kurang:		361.279.800
	Normalisasi BMN Aset Tetap	-
	Penghapusan	
	Transfer Keluar	
	Hibah (Keluar)	361.279.800
	Reklasifikasi Keluar	-
	Penghentian Aset dari Penggunaannya	-
	Ekstrakomptabel	-
Saldo per 30 Juni 2026		83.258.218.090
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026		62.808.826.025
Nilai Buku per 30 Juni 2026		20.449.392.065

Transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa:

1. Pengadaan peralatan pendukung pembelajaran sebesar **Rp76.907.260** berupa Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran (Pembelian Air Conditioning (AC), Magnetic Particle (Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan), LCD Monitor, Air Conditioning (AC), CCTV - Camera Control Television System) sesuai BAST Nomor 2103/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 21 Mei 2026 dan BAP Nomor 2104/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 21 Mei 2026, No SPM 00221T/693499/2026 dan No SP2D 260360000008831;
2. Pengadaan sebesar **Rp157.620.000** berupa Pengadaan Peralatan Penunjang Penguatan Kepakaran Bidang Electric Vehical (Pembelian Engine Dynamometer) Sesuai BAST Nomor 2596/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 23 Juni 2026 dan BAP Nomor 2597/PL34.PPK /KU.01.02/2026 tanggal 23 Juni 2026,

No SPM 00281T/693499/2026 dan No SP2D 260360000011306 tanggal 30 Juni 2026;

3. Hibah Keluar Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya sebesar **Rp361.279.800** Berupa alat Laboratorium Aquatec Smart Ship Ecoblue sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Antara Politeknik Negeri Madura dengan Pemerintah Desa Kalisangka Tahun 2026 Nomor 392/PL34/LK.01.03/2026 tanggal 09 Maret 2026.

Gedung dan
Bangunan
Rp122.920.559.616

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp122.920.559.616 dan Rp0.

Adapun aset nilai Gedung dan Bangunan yang terjadi per 30 Juni 2026 dapat dilihat pada aset berikut:

Tabel 34. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2026

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	122.920.559.616
Mutasi tambah:	-
Penambahan Saldo Awal	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Pembangunan Melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Pencatatan	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Saldo per 30 Juni 2026	122.920.559.616
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	16.551.742.771
Nilai Buku per 30 Juni 2026	106.368.816.845

Transaksi mutasi tambah Gedung dan Bangunan berupa Transfer Masuk dari BA 032 ke BA 139 tanggal 19 September 2025 : 20752 /A.A2/KU.03.02/2025//2486/A/LK.01.03/2025 sebesar Rp122.920.559.616.

Tabel 35. Rincian Gedung dan Bangunan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	%
Gedung dan Bangunan	122.920.559.616	0	100
Total	122.920.559.616	0	100

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp531.123.164

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp531.123.164,- dan Rp0,-.

Adapun aset nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang terjadi per 30 Juni 2026 dapat dilihat pada aset berikut:

Tabel 36. Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2026

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	531.123.164
Mutasi tambah:	-
Penambahan Saldo Awal	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Hibah	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Perolehan Lainnya	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Pencatatan	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 Juni 2026	531.123.164
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	146.968.830
Nilai Buku per 30 Juni 2026	384.154.334

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp531.123.164 dan Rp531.123.164. Rincian nilai aset Jalan, Irigasi

dan Jaringan untuk periode yang berakhir sampai dengan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 37. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	531,123,164	531,123,164	0
Total	531,123,164	531,123,164	0

Aset Tetap Lainnya
Rp1.726.243.533

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, aset dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.726.243.533 dan Rp1.726.243.533.

Adapun aset nilai Aset Tetap Lainnya yang terjadi sampai dengan per 30 Juni 2026 dapat dilihat pada aset berikut:

Tabel 38. Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2026

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	1.726.243.533
Mutasi tambah:	-
Penambahan Saldo Awal	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Hibah	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Pencatatan	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Koreksi Pencatatan	-
akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	1.726.243.533
akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	15.290.000
Nilai Buku per 30 Juni 2026	1.710.953.533

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp1.726.243.533 dan Rp1.726.243.533. Rincian Aset Tetap Lainnya yang dimiliki per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 39. Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	%
Aset Tetap Lainnya	1,726,243,533	1,726,243,533	0
Total	1,726,243,533	1,726,243,533	0

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp. 39.727.334.713

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp39.727.334.713. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan asset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Mutasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 40. Mutasi Nilai KDP Tahun 2026

Saldo awal	13.015.974.997
Mutasi tambah:	26.711.359.716
Penambahan Saldo Awal	-
Perolehan	-
Transfer Masuk	-
Hibah	-
Pengembangan	26.711.359.716
Koreksi Perubahan Nilai	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-
Penghapusan/Penghentian KDP	-
Koreksi Perubahan Nilai	-
Saldo per 31 Desember 2025	39.727.334.713

Dari table di atas terdapat mutasi tambah KDP Tahun 2026 berupa;

1. Pembayaran Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-1 BAKP Nomor 586/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 2 Februari 2026 dan BAP Nomor 587/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 2 Februari 2026 sebesar **Rp 1.720.202.000**, No SPM 00053T, 00053T/693499/2026, No SP2D 260360000002106.;
2. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-2 BAKP Nomor 811/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 24 Februari 2026 dan BAP Nomor 812/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 24 Februari 2026 sebesar **Rp 1.903.065.000**, No SPM 00056T/693499/2026, No SP2D 260360000002522.;
3. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-3 BAKP Nomor 1006/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 9 Maret 2026 dan BAP Nomor 1007/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 9 Maret 2026 sebesar **Rp 2.996.167.000**, No SPM 00116T/693499/2026, No SP2D 260360000004242.;
4. Pembayaran Belanja Modal berupa Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Kesehatan Poltera TA 2025 BAKP Nomor 1052/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 12 Maret 2026 dan BAP Nomor 1053/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 12 Maret 2026 sebesar **Rp 270.218.612**, No SPM 00122T/693499/2026, No SP2D 260360000004589.;
5. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-4 BAKP Nomor 1636/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 20 April 2026 dan BAP Nomor 1637/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 20

April 2026 sebesar **Rp4.535.579.000**, No SPM 00163T/693499/2026, No SP2D 260360000006439;

6. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-5 BAKP Nomor 2161/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 25 Mei 2026 dan BAP Nomor 2162/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 25 Mei 2026 sebesar **Rp6.868.861.000**, No SPM 00224T/693499/2026, No SP2D 260360000009232.;
7. Pembayaran Belanja Modal berupa Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Kesehatan Poltera TA 2025 Sesuai BAKP Nomor 2643/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 26 Juni 2026 dan BAP Nomor 2644/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 26 Juni 2026 sebesar **Rp370.796.104**, No SPM 00285T/693499/2026, No SP2D 260360000011414.;
8. Pembayaran Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura TA 2025 Termin ke-6 Sesuai BAKP Nomor 2641/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 29 Juni 2026 dan BAP Nomor 2642/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 29 Juni 2026 sebesar **Rp8.012.221.000**, No SPM 00284T/693499/2026, No SP2D 260360000011413.;
9. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Bulan Januari s.d Mei sebesar **Rp 34.250.000** (rincian terlampir).

Tabel 41. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.727.334.713	13.015.974.997	100
Total	39.727.334.713	13.015.974.997	100

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp79.522.827.334
.713)

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu Aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat Aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp79.522.827.626) dan (Rp75.605.967.975).

Tabel 42. Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2026

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 59.185.191.947	Rp -	Rp 59.185.191.947
2	Peralatan dan Mesin	Rp 83.258.218.090	Rp 62.808.826.025	Rp 20.449.392.065
3	Gedung dan Bangunan	Rp 122.920.559.616	Rp 16.551.742.771	Rp 106.368.816.845
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 531.123.164	Rp 146.968.830	Rp 384.154.334
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 1.726.243.533	Rp 15.290.000	Rp 1.710.953.533
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 39.727.334.713	Rp -	Rp 39.727.334.713
Akumulasi Penyusutan		307.348.671.063	79.522.827.626	Rp 227.825.843.437

C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp172.447.600

Jumlah Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp172.447.600 dan Rp8.247.511.197 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 43 Rincian Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No.	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Aset Tak Berwujud	199.282.000	199.282.000	-	0,00
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	-	8.068.238.197	(8.068.238.197)	(100,00)
2	Aset Lain-Lain	235.052.070	235.052.070	-	-
Jumlah		434.334.070	8.502.572.267	(8.068.238.197)	(94,89)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya / Amortisasi		(261.856.470)	(255.061.070)	(6.795.400)	2,66
Aset Lainnya		172.477.600	8.247.511.197	(8.075.033.597)	(97,91)

Selanjutnya dijelaskan per jenis Aset Lainnya sebagai berikut:

C. 3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp199.2823.000. dan Rp199.2823.000 Aset Tak Berwujud pada Politeknik Negeri Madura berupa antara lain *software asset*, website dan aset tak berwujud lainnya (film animasi) yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Transaksi penambahan dan/atau pengurangan Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 44. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	199.282.000
Mutasi tambah:	-
Penambahan Saldo Awal	-
Pembelian E-Book	-
Transfer Masuk	-
Hibah	-
Penambahan	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap Lainnya	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Pencatatan	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Hibah (Keluar)	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 Juni 2026	199.282.000
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2026	-
Nilai Buku per 30 Juni 2026	199.282.000

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2026 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 45 Rincian Aset Tak berwujud

No.	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2026	Kenaikan/Penurunan	%
1	Lisensi	Rp 129.200.000	Rp 129.200.000	Rp0,00	-
2	Hak Cipta	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp0,00	-
3	Paten	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp0,00	-
4	ATB Lainnya	Rp 49.882.000	Rp 49.882.000	Rp0,00	-
Jumlah		Rp 199.282.000	Rp 199.282.000	Rp0,00	-

C .3.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Nilai Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp235.052.070 dan sebesar Rp235.052.070. Aset Lain-lain

Tabel 46 Nilai Aset Lain-lain per 30 Juni 2026

No.	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Kenaikan/Pe nurunan	%
1	Aset Tetap yang tidak digunakn dalam operasi pemerintah	Rp 235.052.070	Rp 235.052.070	Rp0,00	-
Jumlah		Rp 235.052.070	Rp 235.052.070	Rp0,00	-

C 3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi amortisasi adalah akun yang melaporkan pengurangan nilai aset tidak berwujud pada neraca. Amortisasi sendiri adalah alokasi biaya aset tidak berwujud secara bertahap selama masa manfaatnya. Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp255.061.070). dan Rp0. Akumulasi Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 47 Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset Lainnya

No.	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2026	Kenaikan/Penurunan	%
1	Akumalsi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	Rp 234.550.470	Rp 234.425.070	Rp125.400,00	0,05
2	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	Rp 1.426.000	Rp 1.226.000	Rp200.000,00	14,03
3	Akumulasi Amortisasi Paten	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp10.000,00	25,00
4	Akumulasi Amortisasi Lisensi	Rp 25.840.000	Rp 19.380.000	Rp6.460.000,00	25,00
Jumlah		Rp 261.856.470	Rp 255.061.070	Rp6.795.400,00	2,60

C. 4 Kewajiban

C. 4.1 Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp552.820.850

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	540.427.850	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PNS dan PPPK Bulan Juli Tahun 2026
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	12.393.000	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2026
Total	552.820.850	

Berdasarkan table di atas, rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 meliputi:

1. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli Tahun 2026 untuk 89 Pegawai sebesar **Rp362.395.506** No SPM 00260T/693499/2026.;
2. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli Tahun 2026 untuk 42 Pegawai sebesar **Rp 178.032.344** No SPM 00261T/693499/2026.;
3. Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2026 untuk 5 Pegawai sebesar **Rp 9.883.000** No SPM 00275T/693499/2026.;
4. Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2026 untuk 1 Pegawai sebesar **Rp2.510.000** No SPM 00274T/693499/2026.;

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp889.880.000

C.4.1.2 Pendapatan Yang Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp889.880.000 dan Rp1.284.629.667.

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa/fasilitas di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49. Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Diterima Dimuka atas UKT Semester Genap	881.546.667	1.223.129.667	(341.583.000)	30,73
Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa ATM	8.333.333	-	8.333.333	100
	889.880.000	1.223.129.667	(341.583.000)	30,73

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. UKT Mahasiswa bulan Februari 2026 untuk mahasiswa semester genap sebesar Rp672.300.000;
2. UKT Mahasiswa bulan Maret 2026 untuk mahasiswa semester genap sebesar Rp6427.324.333;
3. UKT Mahasiswa bulan April 2026 untuk mahasiswa semester genap sebesar Rp178.946.667;
4. UKT Mahasiswa bulan Mei 2026 untuk mahasiswa baru jalur SNBP sebesar Rp10.000.000 dan UKT mahasiswa semester genap Rp13.566.667;
5. UKT Mahasiswa bulan Juni 2026 untuk mahasiswa baru jalur SNBTP sebesar Rp650.600.000 UKT mahasiswa semester genap Rp28.433.333;
6. Sewa lahan untuk ATM Mandiri Bulan Mei sebesar Rp8.333.333.

C.4.1.4 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal Saldo Kas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp101.000.000.

Ekuitas
Rp227.169.404.199

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp227.169.404.199 Rp205.032.330.905.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Rincian Ekuitas per 30 Juni 2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 50. Rincian Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Ekuitas Awal	205.032.330.905	-	100
Surplus/(Defisit)-LO	(13.089.067.933)	(5.841.963.290)	124
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	-	-	
Koreksi Lain	107.500	-	100
Transaksi Antar Entitas	35.226.033.727	3.827.592.716	820
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	22.137.073.294	(2.014.370.574)	1,19
Ekuitas Akhir	227.169.404.199	(2.014.370.574)	11,37

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jumlah pendapatan operasional sebesar **Rp5.564.650.267** yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, sedangkan jumlah Beban Operasional sebesar **Rp18.420.775.878** sehingga defisit dari kegiatan operasional sebesar **(Rp12.856.125.611)** Sedangkan dari Kegiatan Non Operasional terdapat defisit sebesar **(Rp232.942.322)** yang merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Dari perhitungan di Laporan Operasional didapatkan Defisit-LO sebesar **(Rp13.089.067.933)**.

Pendapatan
Negara
Bukan Pajak
Rp5.564.650.
267

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp5.564.650.267 dan Rp3.214.743.667 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN)
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	33.600.000	15.000.000	124,00%
Pendapatan Biaya Pendidikan	5.525.892.667	3.189.743.667	73,24%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	157.600	-	
Pendapatan Sewa tanah, Gedung dan Bangunan	1.666.667		
Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tuisi	3.333.333	10.000.000	-66,67%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	
Jumlah	5.564.650.267	3.214.743.667	100,00

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak 73.09 persen yaitu sebesar **Rp5.564.650.267** dibandingkan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025. Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan Operasional Politeknik Negeri Madura yang diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar **Rp33.600.000** yang disetorkan ke Kas Umum Negara melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI); *(bukti setoran terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini)*
2. Pendapatan Biaya Pendidikan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar **Rp5.525.892.667** dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Disetorkan ke Kas Umum Negara melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) sebesar **Rp5.149.893.000**. *(bukti setoran terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini)*
 - b) Terdapat Jurnal Balik atas Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar **Rp1.281.296.333**. *(Memo Jurnal Balik nomor 2026693499001)*

Tanggal 30 Juni 2026 terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini)

- c) Terdapat Jurnal Penyesuaian atas Pendapatan Biaya Pendidikan pada Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar **Rp881.546.667** (*Memo Penyesuaian nomor 2026693499003 Tanggal 30 Juni 2026 terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini*)
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah merupakan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penunjang Penguatan Kepakaran Bidang Electric Vehicle, sebagaimana didukung oleh BAST Nomor 2596/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 23 Juni 2026 dan BAP Nomor 2597/PL34.PPK/KU.01.02/2026 tanggal 23 Juni 2026. Sebesar **Rp157.600**, No SPM 00281T/693499/2026, No SP2D 260360000011306;
4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar **Rp1.666.666** merupakan pendapatan yang sudah diterima pada bulan Mei-Juni sesuai dengan jurnal pendapatan sewa diterima dimuka sebesar Rp8.333.333 (Pendapatan sewa diterima di muka (periode yang seharusnya belum menjadi pendapatan)) (*Memo Penyesuaian nomor 2026693499009 Tanggal 30 Juni 2026 terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini*);
5. Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi yang merupan pendapatan sewa ATM Mandiri pada tahun 2025 sebesar **Rp3.333.333** (*Memo Penyesuaian nomor 2026693499002 Tanggal 30 Juni 2026 terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini*).

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp9.914.089.316

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai diberikan atas Gaji Induk (Gaji Pokok dan Tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan), Uang Makan, Tunjangan Profesi Dosen, Tunjangan Khusus/Kegiatan dan Uang Lembur. Jumlah pegawai Politeknik Negeri Madura per 30 Juni 2026 sebanyak 85 orang PNS dan 42 Orang PPPK serta penambahan CASN sebanyak 6 orang.

Rincian beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 sebesar Rp16.163.884.067 Rincian beban pegawai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 52. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Kenaikan/ Penurunan
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.529.653.360,	2.231.394.800,	13,37%
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-2.858.797,	0	100,00%
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-863,	-	100,00%
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	44.728,	36.639,	22,08%
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	159.565.522,	146.585.822,	8,85%
511122	Beban Tunj. Anak PNS	48.255.890,	43.150.177,	11,83%
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2.340.000,	-	100,00%
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	323.059.000,	295.352.000,	9,38%
511125	Beban Tunj. PPh PNS	20.557.989,	18.253.299,	12,63%
511126	Beban Tunj. Beras PNS	146.360.820,	129.486.960,	13,03%
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-72.420,	-	100,00%
511129	Beban Uang Makan PNS	210.857.000,	224.263.000,	-5,98%
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-185.000,	-	100,00%
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	52.415.000,	36.510.000,	43,56%
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	566.341.600,	374.325.600,	51,30%
511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	451.581.671,	429.493.200,	5,14%
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1.231.392.034,	783.272.461,	57,21%
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	19.358,	9.755,	98,44%
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	72.695.729,	47.020.188,	54,61%
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	24.826.621,	16.549.870,	50,01%
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	117.038.750,	89.876.666,	30,22%
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	68.599.845,	40.567.270,	69,10%
511628	Beban Uang Makan PPPK	119.343.000,	73.731.000,	61,86%
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	14.817.912,	-	100,00%
512211	Beban Uang Lembur	1.779.000,	5.025.000,	-64,60%
512212	Beban Uang Lembur PPPK	3.684.000,	3.675.000,	0,24%
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.996.420.785,	681.906.159,	339,42%
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	-9.388.021,	-	100,00%
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	764.944.803,	273.740.882,	179,44%
JUMLAH		9.914.089.316,	5.944.225.748,	66,79%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kenaikan beban pegawai 66.79 persen yaitu sebesar Rp9.914.089.316 pada periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dibandingkan dengan 30 Juni 2026. adapun rinciannya:

1. Adanya peningkatan jabatan yang berpengaruh dengan honor yang diterima.
2. Adanya SK kenaikan gaji berkala pegawai PNS

3. Adanya perubahan kelas jabatan tenaga pendidik yang berpengaruh terhadap tunjangan kinerja
4. Adanya SK penambahan sertifikasi dosen.
5. Adanya CPNS sebanyak 6 pegawai.

*Beban Persediaan
Rp939.355.370*

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Persediaan untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebesar Rp939.355.370 dan Rp0 Rincian beban persediaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 53. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Kenaikan /Penurunan
593111	Beban Persediaan konsumsi	924.343.335,	-	100
593131	Beban Persediaan bahan baku	15.012.035,	-	100
JUMLAH		939.355.370,	-	100,

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kenaikan saldo beban Persediaan 100 persen yaitu sebesar Rp939.355.370 pada periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp2.857.661.120*

Jumlah beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebesar Rp2.8577.661.120 dan Rp2.827.195.502. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap.

Rincian beban barang dan jasa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 54. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2024

Akun	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
521111	Beban Keperluan Perkantoran	998.704.132,	862.868.184,	15,74%
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	613.350,	230.900,	165,63%
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	318.047.250,	324.611.000,	-2,02%
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-1.426.250,		-100,00%
521211	Beban Bahan	127.662.600,	232.294.004,	-45,04%
521213	Beban Honor Output Kegiatan	389.292.322,	277.717.400,	40,18%
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	462.992.035,	78.184.900,	492,18%
522111	Beban Langganan Listrik	184.568.131,	140.042.452,	31,79%
522112	Beban Langganan Telepon	1.834.550,	1.856.162,	-1,16%
522113	Beban Langganan Air	19.246.000,	14.935.000,	28,87%
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	338.050.000,	888.155.500,	-61,94%
522151	Beban Jasa Profesi	16.827.000,	6.300.000,	167,10%
522191	Beban Jasa Lainnya	1.250.000,		100,00%
JUMLAH		2.857.661.120,	2.827.195.502,	1,08%

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat kenaikan Beban Barang dan Jasa adalah 1.08 persen yaitu sebesar Rp2.857.661.120 dibandingkan realisasi Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Beban
Pemeliharaan
Rp285.964.986

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp285.964.986 dan Rp109.983.434. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 55. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.102.606,	2.659.152	2085%
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.402.783,	107.324.282	-10%
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.436.840,	-	100%
593114	Beban Persediaan suku cadang	129.022.757,	-	100%
JUMLAH		285.964.986,	109.983.434	160%

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat kenaikan beban pemeliharaan 160 persen yaitu sebesar

Rp285.964.986 dibandingkan realisasi beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Beban
Perjalanan Dinas
Rp387.150.097

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp387.150.097 dan Rp181.056.355 Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 56. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	363.574.849,	183.699.755,	98%
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar	23.575.248,	-2.643.400,	-992%
JUMLAH		387.150.097,	181.056.355,	114%

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat kenaikan beban perjalanan dinas 114 persen yaitu sebesar Rp387.150.097 dibandingkan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp4.039.986.759

Rincian beban pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 57. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.787.915.861,	-	100
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.234.212.020,	-	100
591312	Beban Penyusutan Irigasi	6.006.708,	-	100
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.625.000,	-	100
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	200.000,	-	100
592114	Beban Amortisasi Paten	10.000,	-	100
592116	Beban Amortisasi Lisensi	6.460.000,	-	100
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	125.400,	-	100
JUMLAH		4.036.554.989,	-	100

Berdasarkan Tabel diatas Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp4.036.554.989,00, sedangkan pada periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak terdapat realisasi sehingga mengalami kenaikan sebesar 100 persen.

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2026 terdiri atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.034.794.589,00, Beban Penyusutan Jaringan sebesar Rp1.625.000,00, Beban Amortisasi Paten sebesar Rp10.000,00, serta Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp125.400,00.

*Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
(Rp232.942.322)*

D.8. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp232.942.322) dan Rp5.754.082.

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp232.942.322) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Beban Pelepasan Aset pada Politeknik Negeri Madura sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar **Rp248.379.862**, yang berasal dari transaksi hibah keluar Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp361.279.800, berupa Aquatec Smart Ship Ecoblue. Hibah tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Politeknik Negeri Madura dengan Pemerintah Desa Kalisangka Tahun 2026 Nomor 392/PL34/LK.01.03/2026 tanggal 9 Maret 2026. Nilai beban pelepasan aset merupakan nilai buku aset yang dihitung dari nilai perolehan sebesar Rp361.279.800 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp112.899.938, sehingga diperoleh nilai buku sebesar Rp248.379.862.

2. Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya sebesar **Rp15.437.540** berikut rinciannya:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar **Rp1.079.100** dengan rincian Pengembalian Belanja Barang atas Perjalanan Dinas mengantar BEM kunjungan Studi Banding di PPNS tanggal 18 Oktober 2025 ST 2831/PL34/HM.00.06/202 sesuai simponi NTB 769325511414, NTPN 9974CONA0N13TG56 sebesar Rp1.079.100 yang disetor tanggal 08 April 2026.
- b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar **Rp14.358.440** dengan rincian:
 1. Pengembalian Belanja Pegawai atas Selisih Tunjangan Kinerja Tenaga Pendidik PPPK bulan Januari-Juni, THR, dan Gaji ke-13 Tahun 2025 sesuai simponi NTB 939666214602, NTPN 2544749001E0ECBG sebesar **Rp13.356.416** yang disetor tanggal 21 Mei 2026;
 2. Pengembalian Belanja Pegawai atas Selisih Tunjangan Kinerja Tenaga Pendidik PPPK bulan Januari-Juni, THR, dan Gaji ke-13 Tahun 2025 sesuai simponi NTB 582028214788, NTPN 998A049001E0E950 sebesar **Rp130.165** yang disetor tanggal 21 Mei 2026;
 3. Pengembalian Belanja Pegawai atas Selisih Tunjangan Kinerja Tenaga Pendidik PPPK bulan Januari-Juni, THR, dan Gaji ke-13 Tahun 2025 sesuai simponi NTB 987671214961, NTPN 8234B7QLVBNI28TU sebesar **Rp487.537** yang disetor tanggal 21 Mei 2026;
 4. Pengembalian Belanja Pegawai atas Selisih Tunjangan Kinerja Tenaga Pendidik PPPK bulan Januari-Juni, THR, dan Gaji ke-13 Tahun 2025 sesuai simponi NTB 987671214961, NTPN 8234B7QLVBNI28TU sebesar **Rp384.322** yang disetor tanggal 21 Mei 2026;

Tabel 58 Pendapatan dari kegiatan Non Operasional

Akun	Uraian	Jumlah
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	14.358.440
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.079.100
Jumlah		15.437.540

Tabel 59 Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	% naik/turun
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON OPERASIONAL			
<i>Pendapatan Pelepasan Aset Non Operasional</i>	-	-	-
<i>Beban Pelepasan Aset Non Operasional</i>	248.379.862	-	100
<i>Surplus/ defisit Pelepasan Aset Non Operasional</i>	(248.379.862)	-	100
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
<i>Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</i>	-	-	-
<i>Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</i>	-	-	-
<i>Surplus/ defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</i>	-	-	∞
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
<i>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>	12.091.082	5.754.082	168
<i>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>	-	-	-
<i>Surplus/ defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>	15.437.540	5.754.082	168
<i>Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa</i>	(13.089.067.933)	(5.841.963.290)	124
SURPLUS/DEVISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(13.089.067.933)	(5.841.963.290)	124

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat kenaikan 124persen yaitu sebesar Rp(13.089.067.933) dibandingkan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp205.032.3
30.905*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari Tahun 2026 dan Tahun 2025 adalah masing-masing sebesar Rp205.032.330.905 dan Rp0

E.2. Surplus (Defisit) LO

*Surplus (Defisit) LO
Rp(13.089.067.933)*

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2026 adalah masing-masing sebesar Rp(13.089.067.933) dan Rp(5.841.963.290).

*Koreksi Yang
Menambah/Me-
ngurangi
Ekuitas Yang
Antara Lain
Berasal Dari
Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kes-
alahan
Mendasar
Rp107.500*

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan ataupun berupa kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, termasuk kecurangan (fraud) atau kelalaian.

Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp107.500, Nilai tersebut berasal dari koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp35.226.03
3.727*

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp35.226.033.727 dan Rp3.827.592.716

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 60. Rincian Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	Uraian	2026	2025
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	40.435.121.867,	8.918.229.544,
313121	Diterima dari Entitas Lain	-5.209.088.140,	-3.895.233.082,
313221	Transfer Masuk	0,	-1.195.403.746,
JUMLAH		35.226.033.727,	3.827.592.716,

Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp40.435.121.867 berupa Realisasi Belanja baik belanja pegawai, barang maupun modal pada satker Politeknik Negeri Madura sampai dengan 30 Juni 2026.

Sedangkan diterima dari Entitas Lain sebesar Rp(5.209.088.140) merupakan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan 30 Juni 2026.

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp227.169.404.199*

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp227.169.404.199,00, sedangkan pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00. Dengan demikian, nilai ekuitas pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar Rp227.169.404.199,00 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mencerminkan akumulasi nilai aset bersih pemerintah yang berasal dari selisih antara total aset dengan total kewajiban pada akhir periode pelaporan.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Alokasi DIPA dan Revisi DIPA

*Alokasi DIPA
dan Revisi
DIPA*

Berdasarkan tabel revisi DIPA, sampai dengan 30 Juni 2026 Politeknik Negeri Madura telah melakukan 9 (sembilan) kali revisi DIPA setelah

penetapan DIPA awal. Uraian masing-masing revisi adalah sebagai berikut:

1. DIPA Awal (Revisi 0)

DIPA awal disahkan pada 01 Desember 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.310.660.000, yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp23.064.235.000, PNPB sebesar Rp6.405.993.000, dan SBSN sebesar Rp53.840.432.000.

2. Revisi DIPA ke-1

Revisi DIPA ke-1 disahkan pada 30 Desember 2025 dalam rangka Revisi Prioritas Direktif Presiden. Melalui revisi ini, alokasi Rupiah Murni menjadi Rp22.889.676.000, sedangkan PNPB tetap sebesar Rp6.405.993.000 dan SBSN tetap sebesar Rp53.840.432.000, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp83.136.101.000.

3. Revisi DIPA ke-2

Revisi DIPA ke-2 disahkan pada 19 Februari 2026 dalam rangka Revisi RPD Triwulan I. Pada revisi ini tidak terdapat perubahan pagu anggaran, sehingga Rupiah Murni tetap sebesar Rp22.889.676.000, PNPB sebesar Rp6.405.993.000, SBSN sebesar Rp53.840.432.000, dengan total pagu anggaran tetap sebesar Rp83.136.101.000.

4. Revisi DIPA ke-3

Revisi DIPA ke-3 disahkan pada 07 April 2026 dalam rangka Revisi SBSN dan PRPTNV. Revisi ini mengubah alokasi anggaran menjadi Rupiah Murni sebesar Rp23.887.146.000, PNPB sebesar Rp6.405.993.000, dan SBSN sebesar Rp78.721.837.000, sehingga total pagu anggaran meningkat menjadi Rp109.014.976.000.

5. Revisi DIPA ke-4

Revisi DIPA ke-4 disahkan pada 07 April 2026 dengan keterangan Revisi KPA (Penyesuaian Pagu). Pada revisi ini tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran, yaitu Rupiah Murni sebesar

Rp23.887.146.000, PNPB sebesar Rp6.405.993.000, dan SBSN sebesar Rp78.721.837.000, sehingga total pagu anggaran tetap sebesar Rp109.014.976.000.

6. Revisi DIPA ke-5

Revisi DIPA ke-5 disahkan pada 24 April 2026 dalam rangka Revisi Penajaman Anggaran (Efisiensi). Revisi ini mengubah alokasi Rupiah Murni menjadi Rp23.810.368.000, sedangkan PNPB tetap sebesar Rp6.405.993.000 dan SBSN tetap sebesar Rp78.721.837.000, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp108.938.198.000.

7. Revisi DIPA ke-6

Revisi DIPA ke-6 disahkan pada 11 Mei 2026 dengan keterangan Revisi Penajaman Anggaran (Efisiensi). Pada revisi ini tidak terdapat perubahan pagu anggaran, yaitu Rupiah Murni sebesar Rp23.810.368.000, PNPB sebesar Rp6.405.993.000, dan SBSN sebesar Rp78.721.837.000, sehingga total pagu anggaran tetap sebesar Rp108.938.198.000.

8. Revisi DIPA ke-7

Revisi DIPA ke-7 disahkan pada 11 Mei 2026 dengan keterangan Revisi KPA (Penyesuaian Pagu). Pada revisi ini tidak terdapat perubahan alokasi anggaran. Pagu tetap terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp23.810.368.000, PNPB sebesar Rp6.405.993.000, dan SBSN sebesar Rp78.721.837.000, dengan total sebesar Rp108.938.198.000.

9. Revisi DIPA ke-8

Revisi DIPA ke-8 disahkan pada 11 Mei 2026 dengan keterangan Revisi KPA (Penyesuaian Pagu). Nilai pagu anggaran tidak mengalami perubahan, yaitu Rupiah Murni sebesar Rp23.810.368.000, PNPB sebesar Rp6.405.993.000, dan SBSN sebesar Rp78.721.837.000, sehingga total pagu anggaran tetap sebesar Rp108.938.198.000.

10. Revisi DIPA ke-9

Revisi DIPA ke-9 disahkan pada 11 Mei 2026 dengan keterangan Revisi KPA (Penyesuaian Pagu). Pada revisi ini juga tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran. Alokasi anggaran tetap terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp23.810.368.000, PNPB sebesar Rp6.405.993.000, dan SBSN sebesar Rp78.721.837.000, sehingga total pagu anggaran tetap sebesar Rp108.938.198.000.

F.2. Rekening Pemerintah

*Rekening
Pemerintah*

Pada Tahun Anggaran 2026 satuan kerja UAKPA 139.03.0500.693499 Politeknik Negeri Madura memiliki tiga Rekening Pemerintah yang semuanya telah mendapat izin dari Kementerian Keuangan.

Daftar Rekening Pemerintah Politeknik Negeri Madura untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 61. Daftar Rekening Pemerintah Tahun 2026

NAMA SATKER	NAMA BANK	NO REKENING	ATAS NAMA	NO/TANGGAL SURAT PERSETUJUAN
POLITEKNIK NEGERI MADURA	BANK MANDIRI KCP SAMPANG WACHID HASYIM	81001269349 91000	BPG 036 POLTERA	S- 3615/KPN.1203/2 024 Tanggal 30 Desember 2024
POLITEKNIK NEGERI MADURA	BANK MANDIRI KCP SAMPANG WACHID HASYIM	14000900050 68	BPN 036 POLTERA	S- 37/KPN.1605/202 5 Tanggal 09 Januari 2025
POLITEKNIK NEGERI MADURA	BANK MANDIRI KCP SAMPANG WACHID HASYIM	14000700050 54	RPL 036 PS POLTERA	S- 44/KPN.1605/202 5 Tanggal 09 Januari 2025

F.3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49/M/KEP/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Madura Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Laily Ulfyah, M.T
2. Bendahara Penerimaan : Lilik Kholifatur Rosyidah, S.E.
3. Bendahara Pengeluaran : Rina Izzatul Ilmi, S.Ei.

F.4. Penetapan Basis Akuntansi Akrual

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur tentang penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga wajib disusun berdasarkan Akrual paling lambat tahun 2015. Maka penyusunan Laporan Keuangan satuan kerja Politeknik Negeri Madura Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mulai Tahun Anggaran 2015 menggunakan basis akrual.

Sebelum diterapkannya basis akrual secara penuh, penyusunan Laporan Keuangan sebelum tahun 2015 masih menggunakan *Cash Toward Accrual* (CTA), dimana transaksi keuangan dicatat dan diakui berdasarkan basis kas, selanjutnya setiap akhir periode Politeknik Negeri Madura mengakui transaksi-transaksi akrual melalui jurnal memorial (Jurnal Neraca).

Perbedaan antara *cash toward accrual* dan *full accrual* sesuai PP No. 71 terletak pada komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan, Komponen Laporan Keuangan berdasarkan CTA terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan untuk Tahun 2015, komponen Laporan Keuangan *basis full accrual* Tahun 2015 terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca

- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Perubahan komponen Laporan Keuangan Tahun 2015 dibanding periode sebelumnya mengakibatkan periode pembandingan menjadi nihil (nol) sehingga perubahan kenaikan atau penurunan data keuangan tidak dapat disajikan.

Dalam menyusun laporan keuangan ini, Politeknik Negeri Madura telah menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga maka satuan kerja berkewajiban menyusun Laporan keuangan Semester/Tahunan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam surat dan berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- f. Surat Menteri Keuangan atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor S381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 Perihal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Perubahan;

- g. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-210/PB/2024 perihal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2024 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara;
- h. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-221/PB/2024 perihal Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai; dan KDP/ATB dalam Pengerjaan yang Dihentikan;
- i. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S 51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April – November Tahun 2025;

*Pengungkapan
Lainnya*

F.5. Pengungkapan Lainnya

- Pada Semester I Tahun Anggaran 2026, telah dilaksanakan penghapusan/mutasi keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 1 (satu) unit Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya (Merek: Aquatec Smart Ship Ecoblue, Kode Barang: 3080158999) dengan nilai perolehan sebesar Rp361.279.800,- (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dalam kondisi baik. Pengurangan aset tersebut direalisasikan melalui skema Hibah Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Desa Kalisangka, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 391/PL34/LK.01.03/2026 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 392/PL34/LK.01.03/2026 tertanggal 09 Maret 2026. Pemindahtanganan BMN ini telah mendapatkan persetujuan otoritas pengelola barang melalui Surat Kepala KPKNL Pamekasan Nomor S-3/MK/KNL.1005/2026
- Dana dari Satker lain yang di terima oleh Politeknik Negeri Madura per 30 Juni 2026 sebagai berikut:

No	Tanggal Terima Dana	Tanggal Terima Dana	Jumlah Dana Yang Diterima	Entitas Pemberi Dana	Saldo Dana Per 30 JUNI 2026	Ket.
				Nama Satker		
1	2	3	5	6	8	9
1	17 Apr 2026,	21 Apr 2026,	43.722.000	Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi KEMENDIKTISAINTEK	-	SNBP Batch IV Termin I
2	30 Apr 2026,	08 Mei 2026,	103.132.000	DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN	-	Bantuan Pemerintah berupa Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Pengujian Model Dan Prototipe Tahun Anggaran 2026
3	04 May 2026,	12 May 2026,	68.552.000	DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN	-	Bantuan Pemerintah berupa Program BOPTN Program Penelitian Tahun Anggaran 2026
4	05 May 2026,	12 May 2026,	42.240.000	DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN	-	Bantuan Pemerintah berupa Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun Anggaran 2026
5	05 May 2026,	12 May 2026,	84.560.000	DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN	-	Bantuan Pemerintah berupa Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026
JUMLAH			342.206.000		-	-

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan 30 Juni 2026 Politeknik Negeri Madura telah menerima dana bantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta unit kerja terkait dengan total penerimaan sebesar **Rp342.206.000**. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program di bidang penerimaan mahasiswa baru, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dana bantuan yang diterima terdiri atas:

1. Dana Bantuan Penerimaan Mahasiswa Baru (SNBP Batch IV Termin I) sebesar Rp43.722.000, yang diterima pada tanggal 17 April 2026 dan masuk ke rekening pada tanggal 21 April 2026. Dana tersebut berasal dari Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KEMENDIKTISAINTEK) sebagai dukungan terhadap

pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Batch IV Termin I.

2. Dana Penelitian Program Hilirisasi Riset Prioritas Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp103.132.000, diterima pada tanggal 30 April 2026 dan masuk ke rekening pada tanggal 08 Mei 2026. Dana tersebut berasal dari Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan untuk mendukung pelaksanaan program hilirisasi hasil penelitian.
3. Dana Penelitian Program BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp68.552.000, diterima pada tanggal 04 Mei 2026 dan masuk ke rekening pada tanggal 12 Mei 2026. Dana tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Politeknik Negeri Madura.
4. Dana Penelitian Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp42.240.000, diterima pada tanggal 05 Mei 2026 dan masuk ke rekening pada tanggal 12 Mei 2026. Dana ini diberikan untuk mendukung keberlanjutan penelitian multitahun yang sedang dilaksanakan.
5. Dana Penelitian Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp84.560.000, diterima pada tanggal 05 Mei 2026 dan masuk ke rekening pada tanggal 12 Mei 2026. Dana tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan dana bantuan yang diterima sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp342.206.000. Seluruh dana telah dicatat sebagai penerimaan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada 30 Juni 2026 saldo dana bantuan adalah nihil, yang menunjukkan bahwa dana telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya berdasarkan program masing-masing.

- Capaian Kinerja Politeknik Negeri Madura pada Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebagai berikut:

1. 7731 BEI Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, Bantuan Lembaga

Tabel 62

7731 BEI Penyedia Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN			
		Pagu	Realisasi	Persen tase	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress Capaian
7731	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	3.916.388.000	1.676.422.829	42,81%				
BEI	Bantuan Lembaga	3.916.388.000	1.676.422.829	42,81%				
7731BEI 001	PT Vokasi penerima Dukungan Operasional (BOPTN Vokasi)	2.029.688.000	762.764.531	37,58%	1	Lembaga	0	43%
7731BEI002	PT Vokasi penerima Dukungan Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	1.809.700.000	836.751.038	46,24%	1	Lembaga	0	47%
7731BEI 003	PT Vokasi penerima Dukungan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	77.000.000	76.907.260	99,88%	1	Lembaga	1	100%

Dari tabel diatas dapat di jelaskan Pada Semester I Tahun Anggaran 2026, Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.916.388.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.676.422.829,00 atau mencapai 42,81% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional perguruan tinggi vokasi melalui program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (BOPTN Vokasi).

Realisasi anggaran tersebut terdiri atas beberapa rincian kegiatan sebagai berikut:

1. PT Vokasi Penerima Dukungan Operasional (BOPTN Vokasi) memiliki pagu sebesar Rp2.029.688.000,00 dengan realisasi sebesar Rp762.764.531,00 atau 37,58% dari pagu. Target keluaran sebesar 1,0000 Lembaga dengan realisasi volume RO sebesar 0,0000 dan progress capaian sebesar 43%. Realisasi anggaran digunakan antara lain untuk pembayaran honor tenaga kependidikan Non PNS bulan Mei, penyelenggaraan reuni komunikasi elektro dan keterampilan interpersonal, pelatihan EKG, workshop jurnalistik 2026, porseni, satuan hati dalam lantunan Qur'ani, pembayaran workshop AI Native Programming, serta kegiatan Poltera Vol.2.
2. PT Vokasi Penerima Dukungan Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi) memiliki pagu sebesar Rp1.809.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp836.751.038,00 atau 46,24% dari pagu. Target keluaran sebesar 1,0000 Lembaga dengan realisasi volume RO sebesar 0,0000 dan progress capaian sebesar 47%. Realisasi anggaran menunjukkan bahwa kegiatan dukungan layanan pembelajaran telah berjalan sesuai tahapan pelaksanaan yang direncanakan pada Semester I Tahun Anggaran 2026.
3. PT Vokasi Penerima Dukungan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi) memiliki pagu sebesar Rp77.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp76.907.260,00 atau 99,88% dari pagu. Target keluaran sebesar 1,0000 Lembaga telah terealisasi dengan volume RO sebesar 1,0000 dan progress capaian mencapai 100%. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan,

dukungan sarana dan prasarana pembelajaran telah selesai dilaksanakan pada bulan Mei.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi sampai dengan 30 Juni 2026 telah mencapai Rp1.676.422.829,00 atau 42,81% dari pagu sebesar Rp3.916.388.000,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, dengan sebagian kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai jadwal pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026.

2. 7732 BEI Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi

Tabel 63 7732 BEI Peningkatan dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN			
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress Capaian
7732	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	86.077.095.000	28.395.693.651	32,99%				
BEI	Bantuan Lembaga	949.265.000	157.620.000	16,6%				
001	Modernisasi Lab Pembelajaran dan Riset PTV	949.265.000	157.620.000	16,6%	1	Lembaga	0	17%
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	326.090.000	-	0%				
001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	326.090.000	-	0%	1	Unit	0	8%
DBA	Pendidikan Tinggi	6.079.903.000	1.526.713.935	25,11%				
001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	4.062.154.000	873.770.938	21,51%	980	Orang	0	44%
002	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	1.571.709.000	393.292.997	25,02%	130	Orang	0	41%
003	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	446.040.000	259.650.000	58,21%	59	Orang	0	59%
RAA	Sarana Bidang Pendidikan	16.064.060.000	-	0%				
001	Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	16.064.060.000	-	0%	1	Paket	0	33%
RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	62.657.777.000	26.711.359.716	42,63%				
001	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	62.657.777.000	26.711.359.716	42,63%	1	Unit	0	65%

Pada Semester I Tahun Anggaran 2026, kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi (7732) memiliki pagu anggaran sebesar Rp86.077.095.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp28.395.693.651 atau 32,99% dari pagu anggaran berikut rincian 7732:

- a. 7732 BEI 001 Realisasi anggaran Modernisasi Lab Pembelajaran dan Riset PTV sebesar Rp157.620.000 atau 16,6% dari pagu Rp949.265.000, yang digunakan untuk kegiatan Modernisasi Lab Pembelajaran dan Riset PTV melalui kontrak pengadaan peralatan penunjang penguatan kepakaran bidang Electric Vehical, dengan capaian progres sebesar 17%.
- b. 7732 CBJ 001 Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi, pagu sebesar Rp326.090.000 belum terealisasi (0%) karena masih dalam proses pengadaan jasa konsultasi masterplan, dengan capaian keluaran sebesar 8%.
- c. 7732 DBA 001, 002, dan 003 Pendidikan Tinggi memiliki pagu sebesar Rp6.079.903.000 dengan realisasi sebesar Rp1.526.713.935 atau 25,11%. Realisasi tersebut digunakan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan, dukungan operasional pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan capaian keluaran masing-masing sebesar 44%, 41%, dan 59%.
- d. 7732 RAA 001 Sarana Bidang Pendidikan, pagu sebesar Rp16.064.060.000 belum terealisasi (0%) karena masih dalam proses kontrak pengadaan alat pendukung Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan dan pengadaan mebelair pendukung Gedung Kuliah

Jurusan Kesehatan, dengan capaian keluaran sebesar 33%.

- e. 7732 RBJ 001 Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi memiliki pagu sebesar Rp62.657.777.000 dengan realisasi sebesar Rp26.711.359.716 atau 42,63%. Realisasi tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran honorarium Tim SBSN bulan Juni dan pembayaran Gedung SBSN Termin 5, dengan capaian keluaran sebesar 65%. Pelaksanaan seluruh kegiatan sampai dengan 30 Juni 2026 masih berlangsung sesuai tahapan yang telah ditetapkan dan diharapkan target keluaran dapat diselesaikan pada Semester II Tahun Anggaran 2026.

3. 7732 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi

Tabel 64 7732 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN			
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress Capaian
7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	18.944.715.000	10.363.006.167	54,7%				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.944.715.000	10.363.006.167	54,7%				
994	Layanan Perkantoran	18.937.768.000	10.363.006.167	54,72%	1	Layanan	0	56%
Z07	Layanan BMN	6.947.000	-	0%	1	Layanan	0	12%

Pada Semester I Tahun Anggaran 2026, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi memiliki pagu anggaran sebesar Rp18.944.715.000 dengan realisasi belanja

sebesar Rp10.363.006.167 atau 54,7% dari pagu anggaran.

Realisasi tersebut berasal dari kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan realisasi sebesar Rp10.363.006.167 atau 54,7%. Realisasi anggaran terutama digunakan untuk pemeliharaan Gedung B, pembayaran operasional perkantoran, pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ASN bulan Mei, pembayaran honorarium layanan pendukung perkantoran, serta persiapan pelaksanaan kegiatan wasdal.

Berdasarkan rincian kegiatan, Layanan Perkantoran memiliki pagu sebesar Rp18.937.768.000 dengan realisasi sebesar Rp10.363.006.167 atau 54,72%, dengan target keluaran 1 Layanan dan progres capaian sebesar 56%. Sementara itu, Layanan BMN memiliki pagu sebesar Rp6.947.000 dan sampai dengan 30 Juni 2026 belum terealisasi (0%), dengan target keluaran 1 Layanan serta progres capaian sebesar 12%, karena pelaksanaan kegiatan masih mengikuti tahapan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2026.

**DOKUMEN PENDUKUNG
LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I
TAHUN 2026**